

**PERUBAHAN STRUKTUR SOSIAL PASCA EMIGRASI
DARI JAWA DI GEDONG TATAAN 1905-1930**

SKRIPSI

**MEZA ISMIANI
NPM. 2161010004**



Program Studi : Sejarah Peradaban Islam

**FAKULTAS ADAB
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG**

1447 H/ 2026 M

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perubahan struktur sosial pasca emigrasi dari Jawa di Gedong Tataan pada tahun 1905–1930. Emigrasi dari Jawa ke Gedong Tataan merupakan bagian dari kebijakan kolonial Belanda dalam mengatasi kepadatan penduduk di Pulau Jawa sekaligus membuka dan mengembangkan wilayah pertanian di Lampung. Kedatangan masyarakat dari Jawa membawa perubahan terhadap kehidupan masyarakat Gedong Tataan yang sebelumnya memiliki struktur sosial dan pola kehidupan yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi struktur sosial masyarakat Gedong Tataan sebelum berlangsungnya emigrasi dari Jawa serta mengetahui perubahan struktur sosial masyarakat setelah berlangsungnya emigrasi pada tahun 1905–1930. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi tahap heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber yang digunakan berupa arsip, buku, jurnal, serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan emigrasi dan perkembangan masyarakat di Gedong Tataan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedatangan masyarakat dari Jawa tidak hanya menyebabkan penambahan jumlah penduduk, tetapi juga memengaruhi susunan masyarakat, hubungan sosial, kehidupan ekonomi, pola permukiman, dan pembagian peran dalam kehidupan masyarakat Gedong Tataan. Kehadiran masyarakat Jawa membentuk kelompok masyarakat baru yang berinteraksi dengan penduduk setempat dalam berbagai bidang kehidupan. Interaksi tersebut secara bertahap menyebabkan terbentuknya pola hubungan sosial yang lebih beragam serta perubahan dalam struktur sosial masyarakat Gedong Tataan. Dengan demikian, emigrasi dari Jawa pada periode 1905–1930 menjadi salah satu faktor yang turut membentuk perubahan struktur sosial masyarakat Gedong Tataan pada masa kolonial.

Kata Kunci: Emigrasi, Jawa, Struktur Sosial, Gedong Tataan, 1905–1930.

ABSTRACT

This study examines the changes in the social structure following the emigration of people from Java to Gedong Tataan during 1905–1930. The emigration of people from Java to Gedong Tataan was part of the Dutch colonial policy aimed at addressing population density in Java while developing agricultural areas in Lampung. The arrival of Javanese migrants brought changes to the social life of Gedong Tataan, which previously had its own social structure and patterns of community life. This study aims to examine the condition of the social structure of Gedong Tataan before the emigration from Java and to analyze the changes in the social structure of the community after the emigration during 1905–1930. This research employs a historical method consisting of four stages: heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The sources used include archives, books, journals, and other written sources related to emigration and the development of the Gedong Tataan community. The results show that the arrival of people from Java not only increased the population but also influenced the social composition, social relations, economic life, settlement patterns, and division of roles within the Gedong Tataan community. The presence of Javanese migrants formed new social groups that interacted with the local population in various aspects of life. These interactions gradually contributed to the formation of more diverse patterns of social relations and changes in the social structure of Gedong Tataan. Therefore, the emigration of people from Java during 1905–1930 became one of the factors contributing to the transformation of the social structure of the Gedong Tataan community during the colonial period.

Keywords: Emigration, Java, Social Structure, Gedong Tataan, 1905–1930.

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Meza Ismiani
NPM : 2161010004
Program Studi : Sejarah Peradaban Islam
Fakultas : Adab

Menyatakan secara sungguh bahwasanya skripsi yang judulnya “Perubahan struktur sosial pasca emigrasi dari Jawa di gedong tataan (1905-1930)” ialah benar buah karya penulis sehingga bukanlah hasil memplagiasi tulisan pihak lainnya kecuali di rujukan yang dikutip pada daftar pustaka ataupun footnote. Bila mana di lain periode terbukti ditemui penyimpangan di skripsi berikut, maka penulis siap menerima risiko sejalan atas peraturan yang diberlakukan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Demikian keterangan pernyataan berikut dibentuk secara sebenarnya.

B andar Lampung, 17 Januari 2026

Yang menyatakan,



Meza Ismiani
NPM. 2161010004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS ADAB

Alamat : Jl. Pet. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 708260

PERSETUJUAN

Judul : **Perubahan Struktur Sosial Emigrasi Dari Jawa**
Di Gedung Tataan Tahun 1905-1930
Nama : **Meza Ismiani**
NPM : **2161010004**
Program Study : **Sejarah Peradaban Islam**
Fakultas : **Adab**

MENYETUJUI

Telah Dimunaqosyahkan Dan Dipertahankan Dalam
sidang Munaqosyah Fakultas Adab Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung

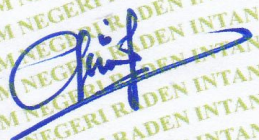
Pembimbing I

Pembimbing II


Dra. Siti Masykurah, M.Sos.I
NIP.196112051991032001


Aan Budianto, S.Pd., M.A
NIP.198907142020121006

Mengetahui,
Ketua Program Studi Sejarah Peradaban Islam


Aan Budianto S.Pd., M.A
NIP.198907142020121006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS ADAB**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suraimin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skrripsi dengan Judul **“Perubahan Struktur Sosial Pasca Emigrasi Dari Jawa Di Gedong Tataan Tahun 1905-1930.”** disusun oleh **Meza Ismiani, NPM. 2161010004**, Program Studi **Sejarah Peradaban Islam**, telah diujikan dalam sidang Munasqosyah Fakultas Adab UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: **Kamis, 09 Juli 2026** di ruang sidang Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

TIM MUNAQOSAH

Ketua Sidang

: Dr. Baharudin, M. Pd.

Sekretaris

: Restu Trisna Wardani, M.H.

Penguji Utama

: Dr. Abd. Rahman Hamid, M.Si

Penguji Pendamping I

: Dra. Siti Masykuroh, M.Sosi

Penguji Pendamping II

: Aan Budianto, S.Pd., MA

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Adab**

Dr. Muhammad Afif Amrulloh, M.Pd.I

NIP. 199002172015031004

MOTTO

“ Meninggalkan kenyamanan untuk menjemput kesempatan. Emigrasi bukan sekedar perpindahan, tapi perjuangan mengejar Impian.”

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji dan Syukur yang tidak ada hentinya penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberi nikmat ,rahmat dan petunjuk nya sehingga penulis bisa sampai di tahap ini dan atas izin Allah SWT penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini ,karya ini penulis persembahkan kepada;

1. Kepada orang tua tercinta Bak Ismail dan Umak Mega Wati. Terimah Kasih atas doa yang tak pernah terucap namun selalu sampai, atas kasih sayang yang tak pernah berkurang meski lelah,serta pengorbanan yang sering kali tak terlihat namun selalu terasa. Dalam setiap Langkah perjuanganku, Bak dan Umak adalah tempat pulang , sumber kekuatan dan alasan terbesarku untuk tetap bertahan dan menyelesaikan perjalanan ini.Semoga karya sederhana ini menjadi bukti kecil dari besar nya cinta dan bakti yang ingin ku persembahkan .Semoga Allah SWT membalas setiap pengorbanan Bak dan Umak dengan kesehatan ,kebahagian dan keberkahan yang tak terputus.
2. Kepada kakak Perempuan ku Devi Novita Sari dan kakak laki laki ku Muis Candra terimah kasih atas doa yang tak pernah putus dan dukungan yang selalu menguatkan penulis sampai di titik ini serta kesabaran dan pengorbanan yang sering kali tak terucap.kalian adalah tempat berbagi teladan dalam menjalani hidup dan penguat Langkah ku ketika lelah dan hampir menyerah semoga di setiap perjalanan hidup kalian di berkahi Allah SWT.
3. Kepada Adik Laki laki ku Muhammad Arsyad Ar-Fikri atas dukungan dan kebersamaan yang selali menguatkan ,serta kehadiran mu menjadi penyemangat di saat lelah dan jenuh semoga karya sederhana ini menjadi motivasi agar kita terus berusaha ,berjuang dsn tidsk mudah menyerah dalam meraih cita -cita semoga Allah SWT memberi kemudahan dan keberkahan dalam setiap Langkah hidup mu.
4. Kepada kakak ipar ku Lista Depi dan Ayuk ipar ku Elystia terimah kasih atas dukungan ,perhatian serta nasihat yang selalu di berikan baik secara langsung mau pun tidak langsung yang telah menjadi penyemangat dalam proses penyelesaian skripsi ini

semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan keberkahan dalam setiap langkah hidup.

5. Kepada keponakan ku Sheikha Hifza Ghania dan Ethan Azkio Nalendra dan Sheza Hifna Ghazia yang selalu menjadi sumber tawa ,semangat dan kebahagiaan di Tengah lelahnya perjalanan ini.semoga kalian tumbuh menjadi pribadi yang kuat berilmu dan penuh kebaikan ,serta tidak pernah takut untuk bermimpi dan berjuang untuk merauh cita cita semoga Allah SWT selalu memberi keberkahan di setiap Langkah hidup kalian.
6. Kepada keluarga besar ku Khodijah Squad dan Romli Squad yang selalu hadir dengan tawa ,doa dan dukungan tanpa syarat terimah kasih telah menjadi ruang pulang tempat berbagi cerita dan sumber semangat di setiap proses yang tidak selalu mudah kebersamaan dan kehangatan kalian memberi warna tersendiri dalam perjalanan ini semoga tali kekeluargaan ini selalu terjaga di liputi kebahagiaan dan penuh keberkahan.
7. Kepada teman-teman ku tak sedarah namun seperti saudara Della Dwi Lestari, Syifana Auliani Jaiz, Siti Anisa, Cesaria Oktaviani terimah kasih atas kebersamaan,dukungan canda tawa dan memberi semangat dan selalu menemani selama perjalanan perkuliahan terutama di masa -masa sulit dalam menyelesaikan skripsi ini kehadiran kalian penting yang membuat setiap proses terasa lebih ringan dan bermakna semoga persahabatan kita tetap terjaga dan semoga kita semua di berikan kemudahan ,kesuksesan serta keberkahan dalam menjalani kehidupan semoga segala kebaikan yang telah kalian berikan kembali pada kalian dalam bentuk keberkahan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kemudahan di setiap perjalanan hidup kalian.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis Meza Ismiani lahir di Desa Purwosari 29 Juni 2003 .penulis merupakan anak ke -3 dari 4 bersaudara putri dari bak Ismail dan umak Mega Wati .Pendidikan penulis mulai dari TK Mutiara Bunda pada tahun 2008 sampai 2009,penulis melanjutkan Pendidikan ke SDN 2 Purwosari tahun 2009 sampai 2015 dan melanjutkan pendidikan ke SMP Sabilul Hasanah tahun 2015 sampai 2018 ,penulis melanjutkan Pendidikan ke SMA Sabilul Hasanah tahun 2018 sampai 2021 dan tahun 2021 penulis melanjutkan ke jenjang kejuruan tinggi pada program studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ,pada semester 7 penulis juga ikut berkontribusi dalam menerbitkan jurnal yang berjudul ‘Perdagangan Lada Lampung Ke Banten Pengaruhnya Pada Gelar Sosial Abad -17’

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Dengan segala puji bagi Allah SWT ,berkat rahmat ,taufik dan hidayah -Nya ,penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selama dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa adanya bantuan ,bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak ,berbagai informasi ,arahan dan motivasi telah sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.Dengan penuh ketulusan ,penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada;

1. Bapak Dr.Muhammad Afif Amrulloh ,M.Pd.I selaku dekan fakultas Adab UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya .yang telah memimpin fakultas Adab .
2. Bapak Aan Budianto,S.PD.MA selaku ketua Prodi Studi Sejarah Peradaban Islam dan bapak Restu Trisna Wardani,M.H. selaku sekretaris Prodi Sejarah Peradaban Islam terimakasih telah memberi arahan dan bimbingan selama masa perkuliahan.
3. Ibu Dra.Siti Masykuroh ,M.Sos.I selaku pembimbing pertama dan bapak Aan Budianto ,S.Pd.,M.A selaku pembimbing ke dua terimakasih karena selalu sabardsn tak luoa juga memberi dukungan dan motovasi dalam penulian skripsi ini,semoga rahmat Kesehatan dan keselamatan selalu Bersama kalian.
4. Kepada seluruh dosen Prodi Sejarah Peradaban Islam yang telah memberi ilmu serta membimbing penulis di masa menjadi mahasiswa aktif.
5. Kepada seluruh staf uin Raden Intan Lampung yang telah membantu dalam proses administrasi serta yang telah memberi informasi selama penulis menjadi mahasiswa aktif .

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN.....	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Kajian	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup Penelitian	9
F. Kajian Terdahulu yang Relevan.....	10
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II BAGAIMANA KONDISI STRUKTUR SOSIAL DI GEDONG TATAAN SEBELUM BERLANGSUNG EMIGRASI JAWA (1905-1930)	15
A. Gambaran Umum Gedong Tataan pada Awal Abad ke- 20	15
B. Kebijakan Kolonial dan Mekanisme Emigrasi	25
C. Pelaksanaan dan Pola Awal Kolonisasi di Gedong Tataan (1905–1928).....	34
D. Adaptasi, Interaksi Awal, dan Pembentukan <i>Enklave</i> Jawa (1905–1930).....	40
BAB III BAGAIMANA PERUBAHAN STRUKTUR SOSIAL MASYARAKATGEDONG TATAAN SETELAH EMIGRASI JAWA (1905–1930)	44
A. Transformasi Sistem Stratifikasi Sosial dan	

Kepemimpinan Lokal.....	44
B. Dinamika Relasi Sosial dan Etnis Antara Komunitas Jawa dan Lampung	57
C. Transformasi Pola Permukiman dan Struktur Kekerabatan	67
D. Sintesis Terbentuknya Masyarakat Majemuk Kolonial (<i>Plural Society</i>).....	81
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85

DAFTAR GAMBAR

2.1	peta distrik Lampung, saat di Gedongtataan termasuk dalam OnderAfdeling Teluk Betung, Tahun 1927	19
2.2	lembaran Ensiklopedie Belanda yang menjelaskan tentang daerah administratif Gedong Tataan	20
2.3	Saran dan pertimbangan tanggal 29 Januari 1904 atas penyelidikan tanggal 16 Januari 1904 no. 254 mengenai "Schema perencanaan Emigrasi dari Jawa dengan suatu penafsiran	22
2.4	Para Kolonis menerima pembagian kebutuhan pertanian, Lampung, 1930	33
2.5	Perkembangan Kolonis pertama, Lampung 1930	41
3.1	Perbandingan pola permukiman tradisional Lampung dan Kolonial Jawa di Gedong Tataan.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbandingan sistem otoritas dan stratifikasi di Gedong Tataan pasca 1905.....	52
Tabel 3.2 Tranformasi sistem penguasaan tanah di Gedong Tataan (1900-1930)	74

BAB I

ENDAHULUAN

A. Latar Kajian

Masyarakat merupakan suatu kesatuan sosial yang di dalamnya terdapat berbagai kelompok, hubungan sosial, norma, serta pembagian peran yang membentuk kehidupan bersama. Dalam kehidupan masyarakat, struktur sosial tidak selalu bersifat tetap. Struktur sosial dapat mengalami perubahan-perubahan seiring dengan perubahan jumlah penduduk, perpindahan masyarakat, perkembangan ekonomi terbentuknya permukiman, serta terjadinya hubungan antara kelompok masyarakat yang berbeda. Oleh karena itu, perubahan struktur sosial dapat di pahami melalui perubahan susunan masyarakat dan hubungan sosial yang berlangsung di dalam. Salah satu faktor yang mendorong perubahan struktur sosial adalah perpindahan penduduk yang di sebut perpindahan penduduk adalah dari suatu wilayah ke wilayah lain tidak hanya menyebabkan perubahan jumlah penduduk, tetapi juga dapat membawa perubahan dalam kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan dan pola hubungan antar masyarakat. Penduduk yang berpindah ke suatu daerah membawa kebiasaan, Bahasa, nilai serta cara hidup dari daerah asalnya. Ketika mereka berintraksi dengan masyarakat setempat, dapat terbentuk hubungan sosial baru yang secara perlahan memengaruhi kehidupan masyarakat di daerah tujuan. Perpindahan penduduk dari pulau Jawa ke luar Jawa berlangsung pada masa pemerintahan Hindia Belanda salah satu wilayah yang menjadi tujuan perpindahan penduduk tersebut adalah Gedong Tataan mulai berlangsung pada tahun 1905. Dalam catatan sejarah, perpindahan tersebut berkaitan dengan kebijakan pemerintah kolonial yang pada masa itu di kenal dengan istilah emigrasi atau kolonisasi pada November 1905, penduduk dari Kedu Jawa Tengah, mulai di pindahkan ke wilayah Gedong Tataan.

Pada Abad ke-19 menjadi saksi transformasi radikal dalam kebijakan agraria dan demografi di Jawa di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Pengenalan Cultuurstelsel (1830-1870) dan penerapan sistem ekonomi liberal berikutnya menciptakan dislokasi sosial yang mendalam di pedesaan Jawa. Hasilnya adalah ledakan populasi yang tidak disertai dengan industrialisasi atau ekspansi lahan pertanian yang memadai. Para ahli demografi kolonial seperti P. Bleeker dan W. B. Bergsma telah

mencatat sejak pertengahan abad ke-19 gejala *overbevolking* (kelebihan penduduk) dan *verpaupering* (pemiskinan) yang parah di wilayahwilayah seperti Kedu, Bagelen, Semarang, dan sebagian Yogyakarta. Fragmentasi lahan warisan (gadogado) mencapai titik di mana petani hanya menguasai petakpetak kecil yang tidak lagi cukup untuk menghidupi keluarga. Kondisi ini, seperti yang dicatat dalam *Koloniale Verslagen* (Laporan Tahunan Hindia Belanda), dianggap sebagai ancaman serius terhadap ketertiban umum dan produktivitas ekonomi koloni.¹

Sebagai respons terhadap kritik humanis di negeri induk dan kesadaran akan tanggung jawab moral, Pemerintah Kolonial meluncurkan Politik Etis pada awal abad ke-20. Di antara tiga program utamanyairigasi, edukasi, dan emigrasiprogram emigrasi atau kolonisatie dipandang sebagai instrumen paling langsung untuk meredakan tekanan demografis di Jawa. Program ini bertujuan untuk memindahkan kelebihan penduduk Jawa ke *Buitengewesten* (daerah luar Jawa) yang dianggap masih memiliki *woeste gronden* (tanah kosong). Lampung, dengan reputasi tanah vulkaniknya yang subur untuk tanaman lada dan kopi, serta posisi strategisnya di Selat Sunda, menjadi tujuan utama. Sejak ekspedisi militer dan konsolidasi kekuasaan di Lampung pada paruh kedua abad ke-19, Belanda melihat potensi besar wilayah ini. Program kolonisasi pertanian Jawa ke Lampung secara resmi dimulai dengan Keputusan Pemerintah (*Gouvernementsbesluit*) tanggal 21 Mei 1905 No. 28, yang menetapkan Lampung sebagai daerah tujuan kolonisasi.

Dalam implementasinya, Gedong Tataan dipilih sebagai salah satu *hoofdplaats* (pos utama) dan pusat administrasi kolonisasi yang pertama dan paling penting di Lampung Selatan. Pemilihan ini didasarkan pada *Memorie van Overgave* (Laporan Serah Terima Jabatan) para pejabat Belanda, yang menggambarkan Gedong Tataan sebagai wilayah yang subur, memiliki akses air yang baik dari Way Sekampung, serta telah menjadi permukiman penting masyarakat adat Lampung Pepadun, sehingga dianggap memiliki infrastruktur sosial awal. Periode 1905-1930 dipilih sebagai fokus penelitian karena mewakili fase formatif yang lengkap. Tahun 1903 menandai dimulainya studi persiapan dan perencanaan teknis intensif oleh *Commissie voor de Emigratie van*

¹ Dea Anastasya Simarmata, "Kebijakan Agraria 1870 Dan Dampaknya Terhadap Mobilitas Sosial Masyarakat Jawa," *Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary* 3, no. 2 (2025): 353–58.

Javaansche Landbouwers (Komisi Emigrasi Petani Jawa), sementara tahun 1930 menjadi batas yang jelas akibat dampak Depresi Ekonomi Besar (*Malaise*) yang menghentikan arus emigrasi dan membekukan struktur sosialekonomi yang telah terbentuk.²

Masyarakat penerima di Gedong Tataan adalah masyarakat adat Lampung, terutama dari klan Pepadun, yang memiliki struktur sosial yang sangat teratur dan hierarkis. Sebagaimana didokumentasikan oleh ahli adat seperti Hilman Hadikusuma, struktur sosial tradisional Lampung dibangun di atas *fondasi titi darah* (garis keturunan) dan *titi balak* (prestasi/jasa). Sistem ini dimanifestasikan dalam stratifikasi sosial yang ketat dengan lapisan Penyimbang (bangsawan adat), *Dalom* (orang merdeka), dan *Menyimah* (rakyat biasa). Masyarakat terorganisir dalam satuan suku (marga) dan *tiuh* (kampung) yang dipimpin oleh seorang Penyimbang. Islam, yang telah masuk sejak abad ke-15, tidak menggantikan adat tetapi berakulturasi membentuk sintesis unik, di mana dinilai *Piil pesenggiri* (harga diri, *raso pareso*) menjadi panduan hidup berbarengan dengan syariat.³

Sebelum kedatangan emigran Jawa, Gedong Tataan didominasi oleh masyarakat adat Lampung Pepadun yang memiliki struktur sosial yang sangat teratur dan hierarkis. Struktur sosial tradisional ini dibangun di atas *fondasi titi darah* (garis keturunan) dan *titi balak* (prestasi/jasa). Sistem ini dimanifestasikan dalam stratifikasi sosial yang ketat dengan tiga lapisan utama: (1) Penyimbang, yaitu golongan bangsawan adat yang memegang hak kepemimpinan turun-temurun, menguasai tanah ulayat, dan memiliki wewenang sebagai pemimpin adat, hakim, dan pengatur distribusi lahan; (2) *Dalom*, yaitu golongan orang merdeka yang memiliki hak menggarap tanah dan berpartisipasi dalam musyawarah adat, namun tidak memiliki hak kepemimpinan; dan (3) *Menyimah*, yaitu rakyat biasa yang umumnya bekerja sebagai petani penggarap, buruh tani, atau pengrajin dengan akses terbatas terhadap kepemilikan tanah. Masyarakat terorganisir dalam satuan suku (marga) dan *tiuh* (kampung) yang dipimpin oleh seorang Penyimbang. Islam, yang telah masuk sejak abad

² Pola Migrasi, Intergenerasi Transmigran, and Analisis Karakteristik, "Pola Migrasi Intergenerasi Transmigran Jawa Di Lampung: Analisis Karakteristik Dan Perkembangan Kehidupan Dzaki," *Journal of Indonesian Rural and Regional Government* 8, no. 2 (2024): 236–50.

³ Hilman Hadikusuma, *Hilman Hadikusuma, Masyarakat Dan Adat Budaya Lampung* (Bandung: Mandar Maju, 2000) : 78-95.

ke-15, tidak menggantikan adat tetapi berakulturasi membentuk sintesis unik, di mana nilai-nilai *Piil pesenggiri* (harga diri, *raso pareso*) menjadi panduan hidup berbarengan dengan syariat. Pola permukiman bersifat tersebar berdasarkan pengelompokan marga, dengan rumah-rumah panggung dan balai adat sebagai pusat kegiatan sosial.⁴

Pasca Emigrasi Gelombang emigran yang tiba di Gedong Tataan antara 1905 dan 1930 terdiri dari ribuan keluarga petani Jawa yang direkrut dengan ketat. Mereka umumnya berasal dari kalangan petani gurem yang dianggap “patuh” (*goed gedrag*), sehat jasmani, dan memiliki pengalaman bertani sawah. Menurut laporan Directie der Kolonisatie (Direktorat Kolonisasi), para kolonis ini tidak hanya membawa alat pertanian sederhana dan benih padi, tetapi juga membawa seluruh struktur budaya pedesaan Jawa. Ini mencakup sistem kekerabatan patrilineal yang kuat, tradisi sambatan (*gotong royong*), hierarki sosial desa yang diatur sekitar posisi lurah, carik, dan kamituwa, serta praktik keislaman yang khas Jawa yang berpadu dengan tradisi Kejawaen. Kehadiran mereka, yang diatur melalui kebijakan kolonial yang segregatif, menciptakan sebuah Javanese enclave di tengah-tengah wilayah adat Lampung.⁵

Sebelum kedatangan emigran Jawa, Gedong Tataan didominasi oleh masyarakat adat Lampung Pepadun yang memiliki struktur sosial yang sangat teratur dan hierarkis. Struktur sosial tradisional ini dibangun di atas fondasi titi darah (garis keturunan) dan titi balak (prestasi/jasa). Sistem ini dimanifestasikan dalam stratifikasi sosial yang ketat dengan tiga lapisan utama: (1) Penyimbang, yaitu golongan bangsawan adat yang memegang hak kepemimpinan turun-temurun, menguasai tanah ulayat, dan memiliki wewenang sebagai pemimpin adat, hakim, dan pengatur distribusi lahan; (2) Dalam, yaitu golongan orang merdeka yang memiliki hak menggarap tanah dan berpartisipasi dalam musyawarah adat, namun tidak memiliki hak kepemimpinan; dan (3) Menyimah, yaitu rakyat biasa yang umumnya bekerja sebagai petani penggarap, buruh tani, atau pengrajin dengan akses terbatas terhadap kepemilikan tanah. Masyarakat

⁴ S. K. Hetami, ‘Emigrasi Ke Lampung: Kebijakan Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Lokal 1905–1942,’ *Jurnal Sejarah Dan Budaya* 10, No. 2 (2016): 145–162,”.

⁵ Dea Anastasya Simarmata, ‘Kebijakan Agraria 1870 Dan Dampaknya Terhadap Mobilitas Sosial Masyarakat Jawa,’ *Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary* 3, No. 2 (2025): 353–358,”

terorganisir dalam satuan suku (marga) dan tiuh (kampung) yang dipimpin oleh seorang Penyimbang. Islam, yang telah masuk sejak abad ke-15, tidak menggantikan adat tetapi berakulturasi membentuk sintesis unik, di mana nilai-nilai piil pesenggiri (harga diri, raso pareso) menjadi panduan hidup berbarengan dengan syariat. Pola permukiman bersifat tersebar berdasarkan pengelompokan marga, dengan rumah-rumah panggung dan balai adat sebagai pusat kegiatan sosial.⁶

Pasca Emigrasi Gelombang emigran yang tiba di Gedong Tataan antara 1905 dan 1930 terdiri dari ribuan keluarga petani Jawa yang direkrut dengan ketat. Mereka umumnya berasal dari kalangan petani gurem yang dianggap “patuh” (goed gedrag), sehat jasmani, dan memiliki pengalaman bertani sawah. Menurut laporan Directie der Kolonisatie (Direktorat Kolonisasi), para kolonis ini tidak hanya membawa alat pertanian sederhana dan benih padi, tetapi juga membawa seluruh struktur budaya pedesaan Jawa. Ini mencakup sistem kekerabatan patrilineal yang kuat, tradisi sambatan (gotong royong), hierarki sosial desa yang diatur sekitar posisi lurah, carik, dan kamituwa, serta praktik keislaman yang khas Jawa yang berpadu dengan tradisi Kejawaen. Kehadiran mereka, yang diatur melalui kebijakan kolonial yang segregatif, menciptakan sebuah Javanese enclave di tengah-tengah wilayah adat Lampung.⁷

Interaksi antara kedua komunitas Muslim (Jawa dan Lampung) terjadi dalam sebuah medan sosial yang sudah memiliki aturan kompleks dan di bawah pengawasan ketat aparat kolonial. Sumber primer kebijakan, seperti *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* tahun 1905 No. 207, secara formal menetapkan pemisahan permukiman antara “*kolonisiertdorpen voor Javanen*” (desa kolonis untuk orang Jawa) dan “*inlandsche kampongs*” (kampung pribumi).⁸ Pemerintah Belanda menerapkan kebijakan yang cenderung memisahkan permukiman dan administrasi (*Kolonisatie Diensten* untuk kolonis dan *Inlands Bestuur*

⁶ “S. K. Hetami, ‘Emigrasi Ke Lampung: Kebijakan Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Lokal 1905–1942,’ *Jurnal Sejarah Dan Budaya* 10, No. 2 (2016): 145–162,”.

⁷ “Dea Anastasya Simarmata, ‘Kebijakan Agraria 1870 Dan Dampaknya Terhadap Mobilitas Sosial Masyarakat Jawa,’ *Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary* 3, No. 2 (2025): 353–358,”

⁸ *Memorie van Overgave van de Resident Der Lampongse Districten* (Laporan Serah Jabatan Residen Lampung), 1915, Arsip Nasional Republik Indonesia, Koleksi Arsip Hindia Belanda, Toegang 2.10.39, Inventaris 209.

untuk pribumi). Laporan tahunan (*Verslag*) *Kolonisatie Diensten* tahun 1910-an, misalnya, dengan saksama mencatat jumlah penduduk, pembangunan rumah, dan luas lahan pertanian untuk setiap blok pemukiman kolonis, sementara arsip *Inlands Bestuur* lebih fokus pada sensus dan urusan pajak di tiuh-tiuh tradisional. Namun, interaksi ekonomi, sosial, dan kultural tak terhindarkan. Kronik lokal (*Tambo*) dan laporan insiden yang tercatat dalam arsip residen (seperti *Mailrapport* 1928, No. 1127) menunjukkan bahwa gesekan maupun kerja sama di pasar dan persawahan memang terjadi, seringkali memaksa intervensi dari pihak keuangan. Proses ini mengakibatkan transformasi mendalam pada struktur sosial asli Gedong Tataan. Sistem stratifikasi tradisional berbasis adat harus berhadapan dengan sistem administratif kolonial yang memperkenalkan otoritas baru seperti lurah kolonis. Surat-surat protes dari Penyimbang kepada Kontrolir Belanda, yang tersimpan dalam arsip *Kolonisatie Diensten*, mengungkapkan ketegangan otoritas ini, di mana para kepala adat mengeluhkan berkurangnya pengaruh mereka atas tanah dan orang. Pola permukiman berubah dari tersebar berdasarkan marga menjadi terkonsentrasi ala desa Jawa. Sistem kekerabatan matrilineal Lampung mengalami tekanan, sementara relasi antar etnis terbentuk dalam pola koeksistensi dan kompetisi yang diatur oleh kerangka politik kolonial. Surat kabar sezaman seperti *Java-Bode* edisi 15 Maret 1919, melaporkan sebuah “insiden antar kelompok” di pasar Gedong Tataan yang diselesaikan oleh pengadilan kolonial, mengindikasikan bagaimana konflik diatur oleh hukum negara dan menjadi bahan pemberitaan publik.⁹

Penelitian ini berangkat dari temuan awal arsip yang menunjukkan bahwa program emigrasi kolonial ke Gedong Tataan bukan sekadar pemindahan penduduk, melainkan sebuah kebijakan yang diterapkan secara sistematis untuk mengubah lanskap demografis, ekonomi, dan sosial wilayah tersebut. Kajian ini akan menelusuri proses historis bagaimana kebijakan tersebut menjadi katalis utama dalam transformasi masyarakat Gedong Tataan sepanjang periode kolonial. Fokus penelitian adalah pada perubahan konkret yang terjadi, yang meliputi: (1) Transformasi Hierarki dan Otoritas, yaitu bagaimana

⁹ “R.Z. Leirissa, *Gedong Tataan: Enclave Jawa Dalam Masyarakat Lampung* (Disertasi, Universitas Indonesia, 1981), Hlm. 87-112.,

susunan kepemimpinan tradisional berdasarkan adat (Penyimbang) berhadapan dan disisipi oleh otoritas baru kolonial (seperti lurah kolonis); (2) Perubahan Pola Permukiman dan Tata Ruang, dari permukiman tersebar berdasarkan klan (tiuh) menjadi desa terkonsentrasi (*kolonisatiedorpen*) beserta implikasi sosialnya; (3) Pergeseran dalam Relasi Sosial-Ekonomi, yang mencakup munculnya hubungan kerja, kompetisi, dan kooperasi baru antara komunitas Jawa dan Lampung di pasar dan persawahan; (4) Adaptasi dan Resistensi Struktur Kekeabatan, khususnya bagaimana sistem kekerabatan matrilineal Lampung merespons tekanan struktural baru; serta (5) Dinamika Interaksi Keagamaan, yakni bagaimana Islam dipraktikkan dan menjadi medan interaksi antara dua komunitas dalam setting kolonial. Dengan demikian, penelitian ini berusaha merekonstruksi narasi proses tersebut dengan mendasarkan analisis pada sumber-sumber sejarah primer.

Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya menyusun kronologi peristiwa emigrasi ke Gedong Tataan, tetapi untuk melakukan analisis sejarah sosialkultural yang kritis. Dengan menjadikan Gedong Tataan sebagai laboratorium sosialhistoris, penelitian ini bertujuan mengungkap bagaimana sebuah kebijakan demografis kolonial beroperasi sebagai mesin pembentuk ulang (*reshaping*) realitas sosial lokal. Temuan penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi substantif bagi penulisan sejarah sosial Lampung yang lebih kaya dan bernuansa, tetapi juga menawarkan pemahaman yang lebih mendalam tentang mekanisme perubahan sosial, proses pembentukan masyarakat majemuk (*plural society*), dan warisan sosial jangka panjang dari rekayasa kolonial dalam konteks Indonesia. berdasarkan latar belakang penelitian ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan utama mengenai bagaimana perubahan struktur sosial pasca emigrasi dari Jawa di Gedong Tataan {1905-1930}?

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi struktur sosial Gedong Tataan sebelum berlangsung emigrasi Jawa 1905-1930 ?
2. Bagaimana perubahan struktur sosial masyarakat Gedong Tataan

setelah emigrasi Jawa 1905-1930 ?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. untuk mengetahui tentang Bagaimana kondisi struktur sosial GedongTataan sebelum berlangsung emigrasi Jawa 1905–1930
2. untuk mengetahui tentang perubahan Struktur Sosial masyarakat Gedong Tataan setelah emigrasi di Jawa 1905-1930.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoriti

Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu sejarah ,sosial dan local dengan fokus pada periode 1905-1930 di Gedong Tataan .Studi ini berupaya merekonstruksi naras

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi beberapa pihak. Bagi penulis, karya ilmiah ini merupakan prasyarat akademis untuk menyelesaikan studi Strata 1 (S1) pada Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab, UIN Raden Intan Lampung. Bagi kalangan akademisi dan peneliti lain, hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi substantif dan pijakan metodologis untuk studi lanjutan mengenai sejarah Lampung, migrasi, atau transformasi sosial di Indonesia. Bagi pemerintah daerah, khususnya di Lampung dan Kabupaten Pesawaran, temuan penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan historis dalam merumuskan kebijakan pembangunan sosialbudaya yang inklusif dan sensitif terhadap akar sejarah kemajemukan masyarakat. Sedangkan bagi masyarakat luas, penelitian ini dapat berperan sebagai media edukasi publik yang meningkatkan kesadaran sejarah tentang asal-usul pluralitas etnis dan budaya di wilayah mereka, sehingga memperkuat fondasi toleransi dan kohesi sosial.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Berikut adalah ruang lingkup kajian “Dampak Emigrasi Pertanian Jawa di Lampung terhadap Struktur Sosial Masyarakat di Gedong Tataan (1905-1930)”. Ruang lingkup ini terdiri dari tiga aspek: spasial (wilayah), temporal (waktu), dan tematik (pokok bahasan).

1. Ruang Lingkup Spasial

Penelitian ini fokus pada wilayah Gedong Tataan. Pada periode kolonial (1905-1930), wilayah ini merupakan bagian dari administrasi *Onderafdeeling* Telokbetong dalam keresidenan Lampung. Pemilihan Gedong Tataan sebagai lokus penelitian didasarkan pada perannya yang sentral sebagai salah satu *hoofdplaats* (pusat utama) dan titik awal (*stamkampong*) permukiman kolonisasi pertanian Jawa di Lampung Selatan. Konsentrasi perubahan sosial akibat intervensi demografis diperkirakan paling tampak dan intensif di wilayah ini, menjadikannya studi kasus yang representatif.

2. Ruang Lingkup Temporal

Penelitian ini akan membatasi analisisnya pada periode 1905 hingga 1930. Pemilihan tahun 1905 sebagai titik awal dikarenakan pada masa itu pemerintah kolonial Hindia Belanda mulai melakukan persiapan dan perencanaan teknis yang intensif untuk program emigrasi besar-besaran ke Lampung, yang tertuang dalam berbagai laporan komisi dan nota kebijakan. Sementara itu, tahun 1930 dipilih sebagai batas akhir karena bertepatan dengan dimulainya Depresi Ekonomi Besar (*Malaise*), yang mengakibatkan penghentian drastis arus emigrasi dan menandai berakhirnya fase ekspansi aktif serta konsolidasi awal program kolonisasi. Rentang waktu 27 tahun ini dianggap cukup untuk mengamati proses emigrasi dan dampak awal terhadap struktur sosial.

3. Ruang Lingkup Tematik

Secara tematik, penelitian ini akan memfokuskan analisis pada dua tema besar yang saling berkaitan. Pertama, proses emigrasi pertanian Jawa, yang mencakup kajian atas kebijakan kolonial, mekanisme perekrutan dan pemindahan, serta pola adaptasi awal kolonis di lingkungan baru. Kedua, dampak emigrasi terhadap struktur sosial masyarakat Gedong Tataan.

Fokus ini akan dijabarkan dalam analisis transformasi pada beberapa aspek kunci: (a) perubahan dalam sistem stratifikasi sosial dan kepemimpinan lokal; (b) dinamika relasi dan interaksi sosial antara komunitas pendatang Jawa dan masyarakat asli Lampung; (c) transformasi tata ruang dan pola permukiman; serta (d) ekspresi dan interaksi keagamaan dalam masyarakat yang menjadi plural. Kajian akan melihat bagaimana kebijakan kolonial dan respons agen-agen sosial (emigran dan masyarakat asli) bersamasama membentuk lanskap sosial baru di Gedong Tataan.

F. Kajian Terdahulu yang Relevan

1. Agus Pramono (2020), dalam disertasinya yang berjudul "Kebijakan Emigrasi Kolonial Belanda ke Lampung: Studi tentang Directie der Kolonisatie 1905-1920" menganalisis lembaga dan kebijakan pelaksana emigrasi dengan menggunakan arsip primer yang kaya.¹⁰ Penelitian ini fokus pada aspek kebijakan dan kelembagaan, belum menyentuh dampak sosial di tingkat masyarakat.
2. Ahmad Taufik (2020, dalam artikelnya yang berjudul "Dampak Sosial Kolonisasi Jawa terhadap Masyarakat Lokal di Lampung Awal Abad ke-20 mengkaji berbagai perubahan sosial yang terjadi akibat kedatangan kolonis Jawa.¹¹ Artikel ini memberikan gambaran umum tentang dampak sosial di tingkat regional, namun belum fokus pada transformasi struktur sosial di suatu wilayah spesifik seperti Gedong Tataan.
3. N.A. Sjafnir (2005) dalam *Kolonisasi Tani Jawa di Lampung 1905-1942* menyajikan penelitian monografis paling komprehensif tentang program kolonisasi di Lampung.¹² Dengan menggunakan sumber arsip kolonial yang luas, Sjafnir secara detail merekonstruksi mekanisme administratif, proses

¹⁰ Agus Pramono, "Kebijakan Emigrasi Kolonial Belanda Ke Lampung: Studi Tentang Directie Der Kolonisatie 1905-1920" (Disertasi, Universitas Gadjah Mada, 2020).

¹¹ Ahmad Taufik, "No Ampak Sosial Kolonisasi Jawa Terhadap Masyarakat Lokal Di Lampung Awal Abad Ke-20," *Jurnal Humaniora* 12 1 (2020): 48.

¹² Sjafnir, *Kolonisasi Tani Jawa Di Lampung 1905-1942*.

perekrutan, pola distribusi lahan, dan perkembangan statistik kolonis. Kekuatan utama karya ini terletak pada kelengkapan data administratif dan analisis kebijakan kolonial. Namun, pendekatannya yang sangat strukturfungsionalis cenderung melihat kolonis sebagai objek pasif kebijakan, sehingga kurang mengeksplorasi agensi dan pengalaman subjektif para kolonis itu sendiri. Penelitian ini lebih lanjut belum menyentuh dinamika sosialbudaya yang terjadi di tingkat komunitas sebagai akibat dari interaksi antara kolonis dan masyarakat asli.

4. Sari Mustika Dewi (2019), *Struktur Sosial Masyarakat Lampung Pepadun dan Pergesarannya pada Masa Kolonial*.¹³ Penelitian ini menganalisis secara diakronis tekanan yang dialami struktur tradisional tersebut selama masa kolonial. Dewi menunjukkan bahwa penetrasi ekonomi kolonial dan administrasi pemerintahan tidak langsung telah mulai mengikis otoritas adat lama sebelum kedatangan kolonis Jawa. Ini adalah wawasan penting yang menunjukkan bahwa emigrasi Jawa masuk ke dalam sebuah lanskap sosial yang sudah berada dalam proses transformasi, bukan statis. Penelitian ini fokus pada interaksi langsung antara kolonis Jawa dan masyarakat Lampung di Gedong Tataan, berdasarkan arsip lokal spesifik. Sedangkan penelitian Dewi (2019) membahas tekanan kolonial secara umum terhadap struktur adat Lampung.
5. Penelitian Suwarno (2020)¹⁴ menyoroti dinamika sosial, ekonomi, dan budaya kolonisasi di Lampung secara umum pada masa kolonial Belanda (1903–1941), mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat kolonial tanpa fokus khusus pada sektor tertentu. Sedangkan penelitian ini berfokus secara spesifik pada bidang pertanian dan pengaruhnya terhadap perubahan struktur sosial masyarakat lokal, terutama akibat kedatangan kolonis Jawa.

¹³ Sari Mustika Dewi, “Struktur Sosial Masyarakat Lampung Pepadun Dan Pergesarannya Pada Masa Kolonial,” *Jurnal Sositologi* 2 (2019): 238.

¹⁴ Suwarno. (2020). *Dinamika sosial ekonomi dan budaya kolonisasi di Lampung Pada masa kolonial Belanda (1905–1941)*. Jurnal Swarnadwipa, 4(3), 75–88.

G. Metode Penelitian

Dalam menyusun tulisan ini penulis menggunakan metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.¹⁵

1. Heuristik

Peneliti mengumpulkan berbagai sumber yang relevan. Sumber primer utama berasal dari arsip kolonial Belanda seperti *Koloniale Verslagen* (Laporan Tahunan) dan *Memorie van Overgave* (Laporan Serah Terima Jabatan) pejabat Belanda di Lampung, yang memberikan data administratif dan gambaran sosial mengenai program emigrasi dan kondisi Gedong Tataan. Sumber primer lain meliputi surat kabar kontemporer (misalnya *JavaBode* dan *Lampongsch Nieuwsblad*) yang dilacak melalui repositori digital seperti Delpher.nl, serta peta dan dokumentasi visual dari koleksi KITLV. Sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan karya akademik lainnya dikumpulkan untuk memberikan konteks dan kerangka teoritis.

2. Ktitik Sumber

Dilakukan untuk menilai keaslian dan kredibilitasnya. Kritik eksternal diterapkan untuk memastikan keotentikan dokumen, seperti memeriksa fisik arsip atau keabsahan sumber digital. Kritik internal lebih lanjut menganalisis isi sumber dengan mempertanyakan siapa penulis, apa kepentingan atau bias yang mungkin ada (terutama dalam dokumen kolonial yang sering mengandung perspektif Eurosentris), serta membandingkan kesaksian antar sumber untuk mendapatkan fakta sejarah yang paling dapat diandalkan.

3. Interpretasi

Tahap interpretasi kemudian menghubungkan fakta-fakta yang telah terverifikasi tersebut untuk membangun pemahaman yang koheren. Dalam penelitian ini, interpretasi tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga analitis. Data tentang kebijakan

¹⁵ Abd Rahman Hamid and Muhammad Saleh Madjid, "Pengantar Ilmu Sejarah," Yogyakarta: Ombak 12, no. 2 (2011).

emigrasi, komposisi demografis, dan laporanlaporan sosial diinterpretasikan dengan menggunakan kerangka teori, khususnya teori strukturasi Anthony Giddens. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis bagaimana struktur yang ada (kebijakan kolonial dan adat Lampung) berinteraksi dengan agensi para aktor (emigran Jawa dan masyarakat asli) sehingga menghasilkan transformasi dalam tatanan sosial Gedong Tataan. Interpretasi diarahkan untuk menjawab kedua rumusan masalah secara komprehensif.

4. Historiografi

Tahap historiografi adalah proses penulisan narasi sejarah berdasarkan sintesis dari seluruh temuan. Dalam tahap ini, penulis menyusun uraian yang kronologisanalitis, yang tidak hanya menyajikan peristiwa tetapi juga menjelaskan hubungan sebabakibat, pola, dan makna dari proses emigrasi serta dampaknya. Penulisan disusun secara sistematis sesuai dengan sistematika penulisan skripsi, di mana argumentasi dibangun secara logis, didukung oleh bukti sejarah yang kuat, dan disajikan dalam bahasa ilmiah yang jelas. Melalui keempat tahap metodologis ini, penelitian ini berupaya menghasilkan suatu rekonstruksi sejarah yang kritis dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai dampak emigrasi pertanian Jawa terhadap struktur sosial masyarakat Gedong Tataan antara tahun 1903 hingga 1930.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun untuk memberikan kerangka yang jelas, terstruktur, dan logis dalam mengkaji dampak emigrasi pertanian Jawa terhadap struktur sosial masyarakat Gedong Tataan pada periode 1905–1930. Penelitian ini disajikan dalam empat bab utama yang saling berkaitan.

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup kajian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II akan menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana kondisi masyarakat Gedong Tataan sebelum berlangsungnya emigrasi Jawa tahun 1905-1930 membahas kondisi masyarakat Gedong Tataan sebelum kedatangan emigran Jawa meliputi struktur sosial masyarakat Lampung, stratifikasi sosial sistem kepemimpinan sosial dan pola permukiman masyarakat..

Bab III akan menjawab rumusan masalah yang kedua perubahan struktur sosial masyarakat Gedong Tataan setelah emigran Jawa tahun 1905-1930 membahas perubahan struktur sosial masyarakat Gedong setelah kedatangan emigran Jawa, termasuk perubahan stratifikasi sosial dan kepemimpinan lokal, dinamika hubungan sosial, sistem kepemimpinan adat, kehidupan sosial dan pola permukiman masyarakat.

Bab IV penutup berisi kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian sedangkan saran berisi masukan yang berkaitan dengan penelitian mengenai perubahan struktur sosial masyarakat Gedong Tataan setelah emigrasi Jawa pada tahun 1905-1930..

BAB II

Bagaimana kondisi struktur sosial Gedong Tataan sebelum berlangsung emigrasi Jawa 1905-1930 ?

A. Gambaran Umum Gedong Tataan pada Awal Abad ke-20

Gedong Tataan pada awal abad ke-20 merupakan wilayah yang secara administratif termasuk dalam Onderafdeeling Telokbetong, di bawah Keresidenan Lampung dalam pemerintahan Hindia Belanda. Wilayah ini terletak di dataran rendah dengan ketinggian sekitar 50–100 meter di atas permukaan laut, dilintasi oleh Way Sekampung yang berperan sebagai sumber irigasi alami sekaligus jalur transportasi air. Kondisi tanahnya yang bersifat vulkanis, dengan jenis tanah andosol dan latosol, sangat subur dan cocok untuk pengembangan tanaman pangan, terutama padi sawah dan palawija. Dari sisi iklim, Gedong Tataan memiliki tipe iklim tropis basah dengan curah hujan rata-rata 2.000–3.000 mm per tahun, yang mendukung aktivitas pertanian sepanjang tahun.¹⁶

Secara demografis, sebelum kedatangan emigran Jawa, wilayah ini dihuni oleh masyarakat adat Lampung dari subkelompok Pepadun, yang tersebar dalam beberapa marga (klan) seperti Marga Gunung Sugih, Marga Nuban, dan Marga Tiga. Setiap marga dipimpin oleh seorang Penyimbang, yang memiliki otoritas penuh atas tanah ulayat (*pusako*) dan berperan sebagai pemimpin adat, hakim tradisional, dan pengatur distribusi lahan. Stratifikasi sosial masyarakat Lampung saat itu sangat ketat, terdiri dari :¹⁷

1. Penyimbang, golongan bangsawan adat yang memegang hak kepemimpinan turuntemurun, menguasai tanah ulayat, dan memiliki wewenang dalam penyelesaian sengketa. Selain memiliki hak kepemimpinan, penyimbang juga menguasai tanah ulayat yang menjadi basis utama kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat adat. Penguasaan tanah ulayat ini bukan bersifat kepemilikan individual, melainkan hak pengelolaan kolektif yang berada di bawah otoritas penyimbang. Dalam praktiknya, penyimbang memiliki kewenangan untuk mengatur pemanfaatan

¹⁶ Hiroyoshi Kano, *Land Tenure System and the Desa Community in Nineteenth-Century Java* (Tokyo: Institute of Developing Economies, 1977), Hlm. 45-50.,

¹⁷ koleksi Arsip Kolonial Arsip Nasional Republik Indonesia, *Memorie van Overgave van de Residentie Lampongsche Districten*, 1915.

tanah, pemberian izin pembukaan lahan, serta menentukan batas-batas wilayah adat. Posisi ini menjadikan penyimbang sebagai aktor sentral dalam pengelolaan sumber daya alam dan hubungan agraria masyarakat Lampung.¹⁸

Dalam aspek sosial dan hukum adat, penyimbang berperan penting dalam penyelesaian sengketa dan konflik yang terjadi di dalam komunitas. Sengketa yang berkaitan dengan tanah, perkawinan, pelanggaran adat, maupun hubungan antarkelompok umumnya diselesaikan melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh penyimbang. Keputusan yang diambil memiliki kekuatan mengikat secara moral dan sosial, karena didasarkan pada norma adat yang dihormati oleh masyarakat. Dengan demikian, penyimbang tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin simbolik, tetapi juga sebagai penegak hukum adat dan mediator sosial yang menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat adat Lampung.

2. Dalam, golongan orang merdeka yang memiliki hak menggarap tanah dan berpartisipasi dalam musyawarah adat, tetapi tidak memiliki hak untuk menjadi pemimpin marga. Dalam aspek ekonomi, dalam memiliki hak untuk menggarap tanah adat yang berada dalam wilayah marga. Hak pengelolaan tanah ini diberikan berdasarkan izin dan pengaturan adat yang berada di bawah otoritas penyimbang. Dalam dapat membuka ladang, bercocok tanam, dan memanfaatkan hasil bumi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun tidak memiliki hak kepemilikan penuh atas tanah tersebut. Dengan demikian, hubungan antara dalam dan tanah bersifat hak pakai yang diatur oleh norma adat, bukan hak milik individual sebagaimana dalam sistem agraria modern.¹⁹

Secara sosial-politik, dalam memiliki hak untuk berpartisipasi dalam musyawarah adat, terutama dalam pembahasan perkara yang menyangkut kepentingan bersama, seperti pembagian lahan, penyelesaian sengketa ringan, dan pelaksanaan upacara adat. Namun demikian, partisipasi dalam bersifat terbatas, karena mereka tidak memiliki hak untuk menduduki posisi kepemimpinan marga atau jabatan adat tertinggi. Kepemimpinan adat tetap berada di tangan penyimbang sebagai golongan bangsawan. Kondisi ini mencerminkan adanya

¹⁸ *Adat-Instellingen Der Lampongsche Districten, Diterbitkan Oleh Het Kantoor Voor Inlandsche Zaken (1910), Hlm. 15-18.,*

¹⁹ “Zainal Abidin, *Struktur Masyarakat Marga Di Lampung* (Bandarlampung: Penerbit Universitas Lampung, 2010), Hlm. 98,

stratifikasi sosial yang jelas dalam masyarakat Lampung, di mana dalam berperan sebagai pendukung utama struktur sosial dan ekonomi, tetapi tidak sebagai pengambil keputusan tertinggi dalam sistem adat.

3. Menyimah, rakyat biasa yang umumnya bekerja sebagai petani penggarap, buruh tani, atau pengrajin, dengan akses terbatas terhadap kepemilikan tanah. Dalam kehidupan ekonomi, menyimah umumnya bekerja sebagai petani penggarap, buruh tani, atau pengrajin dengan akses yang terbatas terhadap kepemilikan dan penguasaan tanah. Mereka menggarap lahan milik adat atau lahan yang dikuasai oleh penyimbang dan dalam berdasarkan sistem bagi hasil atau izin sementara. Kondisi ini menyebabkan posisi ekonomi menyimah relatif rentan, karena bergantung pada ketersediaan lahan, musim pertanian, serta kebijakan adat yang berlaku. Meskipun demikian, golongan menyimah tetap menjadi tulang punggung produksi agraris dan kegiatan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat Lampung.²⁰

Secara sosial dan politik adat, menyimah memiliki keterbatasan dalam partisipasi musyawarah adat dan pengambilan keputusan. Mereka umumnya tidak dilibatkan secara langsung dalam forum adat kecuali dalam perkara tertentu yang menyangkut kewajiban kerja atau pelaksanaan upacara adat. Namun demikian, keberadaan menyimah tetap diakui sebagai bagian integral dari komunitas adat, karena peran mereka menopang keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.²¹

Kehidupan sosial budaya masyarakat Lampung saat itu diatur oleh adat Pepadun yang kuat, dengan serangkaian ritual seperti *cakak pepadun* (penobatan penyimbang), *begawi* (pesta adat), dan *nyambai* (musyawarah adat). Agama Islam telah mengakar sejak abad ke-16, tetapi tidak menghilangkan tradisi lokal. Terjadi akulturasi yang menghasilkan bentuk keislaman khas Lampung, di mana nilai-nilai *Piil pesenggiri* (harga diri, *raso pareso*) menjadi panduan perilaku sosial. Sistem pendidikan keagamaan dilaksanakan

²⁰ R. Ginting, *Hukum Tanah Adat Lampung: Dinamika Dan Perkembangannya* (Bandarlampung: Aura Publishing, 2015), Hlm. 75-77

²¹ Jan Brennan, "Keuntungan Kolonial Dari Kerja Paksa: Sistem Priangan Dari Tanam Paksa Kopi Di Jawa, 1720-1870. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), Hlm. 89-92.,"

melalui meunasah (*surau*) dan pengajian yang dipimpin oleh ulama setempat.

Pola permukiman masyarakat Gedong Tataan juga mencerminkan hubungan erat antara struktur sosial dan lingkungan alam. Permukiman dibangun secara tersebar berdasarkan pengelompokan marga (*tiuh*), dengan rumah-rumah panggung yang terbuat dari kayu lokal dan beratap ijuk atau rumbia. Bentuk rumah panggung tidak hanya berfungsi sebagai adaptasi terhadap kondisi alam seperti kelembapan, banjir, dan binatang liar tetapi juga mencerminkan nilai simbolik dan status sosial dalam masyarakat adat. Jarak antarrumah yang relatif berjauhan mempertegas otonomi keluarga dalam kerangka kolektif marga. Setiap permukiman dilengkapi dengan balai adat yang berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial, politik, dan kultural. Balai adat menjadi tempat musyawarah marga, penyelesaian sengketa, pelaksanaan upacara adat, serta pengambilan keputusan penting yang menyangkut kepentingan bersama. Keberadaan balai adat menegaskan bahwa ruang sosial masyarakat Gedong Tataan tidak hanya ditata secara fisik, tetapi juga diorganisasikan berdasarkan nilai-nilai adat dan kekerabatan yang telah mengakar kuat. Dengan demikian, sebelum masuknya sistem kolonial, Gedong Tataan telah memiliki tatanan ekonomi, permukiman, dan kelembagaan sosial yang relatif mapan dan berfungsi secara integratif.

Dari sisi ekonomi, masyarakat Gedong Tataan bergantung pada sistem perladangan berpindah dan sawah tadah hujan, dengan komoditas utama lada, kopi, dan padi lokal. Mereka juga telah mengenal perdagangan dengan wilayah pesisir melalui jaringan sungai, terutama dengan Pelabuhan Panjang. Pola permukiman tersebar sesuai dengan pengelompokan marga, dengan rumah-rumah berbentuk panggung yang dibangun dari kayu dan beratap ijuk. Setiap permukiman dilengkapi dengan balai adat sebagai pusat kegiatan sosial dan musyawarah.²²

²² Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), "Kartografi Indonesia 1437, Dalam Majalah ARSIP, Edisi 75" (Jakarta, 2018).hlm. 19

Gambar 2.1 Peta Distrik Lampung, saat itu Gedong Tataan termasuk dalam Onderafdeeling Teluk Betung, Tahun 1927



Sumber: ANRI, Kartografi Indonesia 1437, sebagaimana dimuat dalam Majalah ARSIP Edisi 75, 2018, hlm. 19.

Peta ini secara jelas menunjukkan posisi administratif Gedong Tataan dalam struktur pemerintahan kolonial, menjadi bukti visual penting tentang konteks spasial di mana proses kolonisasi akan berlangsung. Letak Gedong Tataan sekitar 25 km di sebelah barat Tanjungkarang menjadikannya mudah dijangkau dari Pelabuhan Panjang, pintu masuk utama para kolonis dari Jawa. Pemerintah kolonial, melalui Directie der Kolonisatie, telah memetakan wilayah ini sebagai lokasi yang ideal karena kedekatannya dengan jalur transportasi kolonial yang sedang dikembangkan, termasuk rencana pembangunan jalan raya yang menghubungkan Telukbetung dengan daerah-daerah pertanian di pedalaman. Dalam laporan penyelidikan H.G. Heyting tahun 1904 yang direkomendasikan kepada Gubernur Jenderal, dinyatakan bahwa: "Gedong Tataan memiliki keunggulan komparatif tidak hanya karena kesuburan tanahnya, tetapi juga karena aksesibilitasnya dari pelabuhan dan potensinya untuk dikembangkan menjadi pusat produksi pertanian yang terintegrasi dengan jaringan distribusi kolonial."²³

²³ "ANRI, Algemene Secretarie, Grote Bundel Besluit No. 1677: 'Advies En Overwegingen Betreffende Het Emigratieplan van Java Naar de Lampongsche Districten,' 29

Gambar 2.2 Lembaran ensiklopedi Belanda yang menjelaskan tentang daerah administratif Gedong Tataan.



Sumber: *Encyclopaedia van Nederlandsch Indie, Tweede Druk, H - M, s' Gravenhage*, halaman 509-522

Keberadaan Gedong Tataan dalam ensiklopedia resmi kolonial ini menunjukkan signifikansi wilayah tersebut dalam administrasi Hindia Belanda pasca-kolonisasi. Pemerintah kolonial memberikan berbagai bentuk bantuan dan insentif material yang cukup besar kepada kolonis untuk menjamin keberlangsungan hidup dan mengurangi risiko kegagalan di dua tahun pertama, sebagaimana dilaporkan dalam sumber primer:²⁴

- a) Setiap kepala keluarga mendapat premi tunai sebesar 20 gulden.
- b) Disediakan alat-alat rumah tangga (masak) dan alat-alat pertanian dasar.
- c) Dijamin tempat tinggal (perumahan) dan bahan makanan pokok selama dua tahun pertama.

Januari 1904, Hlm. 3,”

²⁴ J. van Den Berg, *De Kolonisatie Der Javanen in de Buitengewesten (Wageningen: H. Veenman & Zonen, 1939), Hlm. 112-115.,*

- d) Total biaya yang dikeluarkan pemerintah diperkirakan mencapai 300 gulden per kepala keluarga, belum termasuk investasi besar untuk pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan dan irigasi.

Dengan demikian, posisi Gedong Tataan dalam struktur kolonial tidak semata-mata ditentukan oleh kondisi alamiahnya, melainkan oleh konstruksi administratif dan infrastrukural yang sengaja dirancang untuk mendukung program emigrasi pertanian Jawa. Wilayah Gedong Tataan terbentang di dataran rendah dengan ketinggian 50-100 meter di atas permukaan laut, dilintasi oleh Way Sekampung yang menjadi urat nadi kehidupan ekonomi dan transportasi. Namun, yang lebih penting dari sekadar deskripsi topografis adalah bagaimana kondisi geografis ini dimaknai dan dimanfaatkan dalam konteks kolonial. Way Sekampung tidak hanya berfungsi sebagai sumber irigasi alami, tetapi juga sebagai jalur transportasi air yang memungkinkan distribusi hasil pertanian ke pelabuhan Panjang dan selanjutnya ke pasar kolonial. Laporan *Koloniale Verslagen* tahun 1905 menyebutkan bahwa wilayah ini dipilih karena "memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan pertanian intensif dengan sistem irigasi teknis yang dapat mendukung produktivitas berkelanjutan."²⁵ Pertimbangan ini menunjukkan bahwa pemerintah kolonial melihat geografi bukan sebagai entitas statis, melainkan sebagai sumber daya yang dapat direkayasa untuk kepentingan ekonomi. Tanah vulkanis yang subur (*jenis andosol* dan *latosol*) dinilai cocok untuk pengembangan padi sawah intensif ala Jawa, berbeda dengan sistem perladangan tradisional Lampung yang dianggap kolonial sebagai "kurang produktif" dan "tidak efisien."²⁶

Sebelum kedatangan kolonis Jawa, masyarakat Gedong Tataan telah mengembangkan sistem pertanian yang kompleks dan beradaptasi dengan kondisi lingkungan. Sistem perladangan berpindah (ladang berpindah atau huma) menjadi praktik utama, di mana masyarakat membuka hutan, menanaminya selama beberapa

²⁵ "Koloniale Verslagen 1905 (Batavia: Landsdrukkerij, 1906), Hlm. 234-235,"

²⁶ "Verslag over de Kolonisatie van Javaansche Emigranten in de Lampongsche Districten over Het Jaar 1909 (Batavia: Landsdrukkerij, 1910), Hlm. 8,"

musim, kemudian meninggalkannya untuk memulihkan kesuburan tanah. Komoditas utama yang dikembangkan meliputi lada (*Piper nigrum*) yang menjadi komoditas perdagangan penting sejak abad ke-17, kopi, serta padi lokal yang ditanam di sawah tadah hujan terbatas. Fundamental adalah sistem penguasaan tanah yang berlaku. Tanah dalam masyarakat adat Lampung Pepadun dipahami sebagai tanah ulayat (*pusako*) yang dimiliki secara kolektif oleh marga, bukan sebagai properti individual. Dalam laporan *Adat-Instellingen Der Lampongsche Districten* (1910) yang disusun oleh *Kantoor Voor Inlandsche Zaken*, dijelaskan bahwa: "Tanah dalam masyarakat Lampung tidak dapat dijual atau dialihkan kepada pihak luar marga tanpa persetujuan seluruh anggota marga yang dipimpin oleh Penyimbang. Hak atas tanah melekat pada keanggotaan marga, bukan pada individu."²⁷

petani penggarap dengan akses yang semakin terbatas terhadap tanah ulayat.¹⁵

Gambar 2.3 Para kolonis menerima pembagian kebutuhan pertanian, Lampung, 1930



Sumber: ANRI, KIT No. 315-14 (atas), KIT No. 314-32 (bawah)

Keterangan: Foto ini menjadi bukti visual nyata tentang mekanisme bantuan pemerintah yang terstruktur kepada kolonis, memperlihatkan interaksi langsung antara aparat dan penerima manfaat.

²⁷ "Adat-Instellingen Der Lampongsche Districten (Batavia: Kantoor Voor Inlandsche Zaken, 1910), Hlm. 16,"

Gelombang pengiriman kolonis berlangsung secara periodik dan terdokumentasi dengan rapi. Sebagai contoh, berdasarkan arsip Algemene Secretarie (Surat dari Pemerintah Daerah Karesidenan-Distrik Lampung kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, No. 8030/4, tanggal 23 November 1918), pada tahun itu saja sebanyak 278 keluarga dari Desa Bagelen, Karesidenan Kedu, dipindahkan ke Gedong Tataan. Aktivitas pengiriman kolonis berlangsung intensif dari 1905 hingga 1928, menandai fase aktif dan masif dari program ini.²⁸

Penyimbang sebagai pemimpin adat memiliki otoritas untuk mengatur pemanfaatan tanah ulayat, memberikan izin pembukaan lahan kepada anggota marga (Dalom dan Menyimah), serta menyelesaikan sengketa pertanahan. Sistem ini menjamin keberlanjutan akses tanah bagi seluruh warga marga, tetapi sekaligus membatasi munculnya kepemilikan individual. Dalam praktiknya, Dalom memiliki hak menggarap tanah yang lebih luas dibanding Menyimah, namun keduanya tidak memiliki hak kepemilikan penuh. Hubungan antara individu dan tanah bersifat hak pakai yang diatur oleh norma adat, bukan hak milik absolut.²⁹ Keberadaan sistem hak ulayat ini kelak menjadi sumber ketegangan ketika pemerintah kolonial mulai mengalokasikan lahan untuk kolonis Jawa, karena konsep tanah sebagai komoditas yang dapat dialihkan kepada pendatang bertentangan secara fundamental dengan kosmologi adat Lampung. Dalam *Memorie van Overgave* tahun 1915, disebutkan bahwa para Penyimbang di Gedong Tataan keberatan dengan pengambilalihan tanah ulayat untuk kolonisasi, namun protes mereka "dapat diredakan dengan kompensasi terbatas dan jaminan bahwa tanah adat yang tidak digunakan akan tetap berada di bawah otoritas marga.

Agama Islam telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gedong Tataan jauh sebelum kedatangan kolonis Jawa. Proses Islamisasi di Lampung sejak abad ke-16 tidak menghapus struktur adat yang telah ada, melainkan membentuk sintesis unik antara ajaran

²⁸ Lly Touwen-Bouwsmas, "Fotografie Als Historische Bron: De Beeldvorming van Kolonisatie in Nederlands-Indië," *Tijdschrift Voor Geschiedenis* 112, No. 3 (1999): 365-381.

²⁹ "Hilman Hadikusuma, Masyarakat Dan Adat Budaya Lampung (Bandung: Alumni, 1989), Hlm. 89-92,"

Islam dan nilai-nilai lokal. Dalam laporan kolonial Nota van Toelichting tahun 1898, disebutkan bahwa "masyarakat Lampung memeluk agama Islam dengan taat, namun praktik keagamaan mereka tidak dapat dipisahkan dari adat istiadat yang telah berabad-abad mengatur kehidupan sosial."³⁰

Institusi keagamaan utama adalah meunasah atau surau, yang memiliki fungsi ganda: di siang hari menjadi tempat musyawarah adat dan penyelesaian sengketa (*nyambai*), di malam hari berfungsi sebagai tempat pengajian dan salat berjamaah. Dalam laporan *Memorie van Overgave* tahun 1903, disebutkan bahwa hampir setiap *tiuh* (kampung) di Gedong Tataan memiliki setidaknya satu meunasah yang menjadi pusat kegiatan sosial dan keagamaan. Keberadaan meunasah ini menunjukkan bahwa ruang sosial masyarakat Lampung tidak terpisah antara yang sakral dan profan; keduanya terintegrasi dalam satu institusi yang mencerminkan sintesis Islam-adat.³¹

Kepemimpinan keagamaan berada di tangan lebai atau penghulu, tokoh yang memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran Islam sekaligus hukum adat. Dalam struktur sosial Lampung, lebai menempati posisi terhormat, sering kali setara dengan Penyimbang dalam urusan keagamaan. Mereka bertugas memimpin ritual keagamaan, memberikan fatwa dalam masalah fikih, serta menjadi penasihat spiritual bagi para pemimpin adat. Berbeda dengan kolonis Jawa yang kemudian membawa tradisi modin atau kaum dengan corak keislaman yang lebih sinkretis, masyarakat Lampung mengembangkan corak keislaman yang lebih "*ortodoks*" dalam pengertian kuatnya pegangan pada syariat, namun tetap terbuka terhadap akulturasi dengan adat.³²

Dalam praktik ritual, perpaduan Islam dan adat tampak jelas dalam berbagai upacara. Upacara begawi pesta adat besar dalam rangka penobatan Penyimbang atau perkawinan bangsawan selalu diawali dan diakhiri dengan doa-doa Islam, pembacaan ayat Al-

³⁰ "Nota van Toelichting Betreffende de Lampongsche Districten (Batavia: Landsdrukkerij, 1898), Hlm. 42,"

³¹ "Suryadi, 'Corak Keislaman Masyarakat Lampung Pepadun: Peran Penyimbang Dan Adat Dalam Praktik Agama,' Jurnal Al-Qalam 27, No. 1 (2021): 95-97,"

³² "Adat-Instellingen, Op.Cit., Hlm. 22-23,"

Qur'an, dan shalawat. Demikian pula dalam ritual daur hidup seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian, doa-doa Islam dipanjatkan berdampingan dengan prosesi adat. Laporan kolonial tahun 1910 mencatat bahwa "masyarakat Lampung sangat taat menjalankan rukun Islam seperti salat dan puasa, namun tetap mempertahankan ritual adat yang telah diislamisasi, seperti kenduri arwah dan selamatan."³³

Dengan demikian, pada awal abad ke-20, Gedong Tataan bukanlah wilayah "kosong" secara sosial dan kultural, melainkan komunitas dengan struktur sosial, sistem pertanahan, dan identitas keislaman yang mapan. Kehadiran kolonis Jawa kemudian memasuki lanskap sosial yang telah kompleks ini, memicu dinamika transformasi yang akan dibahas dalam bagian-bagian selanjutnya. Pemerintah kolonial, melalui kebijakan emigrasinya, tidak hanya memindahkan manusia, tetapi juga mempertemukan dua sistem sosial yang berbeda secara fundamental, yang konsekuensinya akan membentuk struktur masyarakat Gedong Tataan hingga masa-masa berikutnya.

B. Kebijakan Kolonial dan Mekanisme Emigrasi

1. Pola Rekrutmen Emigran Jawa

Program emigrasi pertanian Jawa ke Lampung berakar pada implementasi Politik Etis (Politik Balas Budi) yang dicanangkan pemerintah kolonial Belanda pada pergantian abad ke-20.³⁴ Kebijakan ini lahir sebagai respons moral atas eksploitasi kolonial yang telah berlangsung ratusan tahun, yang digagas oleh kaum etis seperti Pieter Brooshooft (wartawan *De Locomotief*) dan C.Th. van Deventer (politikus). Dalam pidato penobatannya pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina menegaskan secara resmi tanggung jawab moral pemerintah Belanda terhadap kesejahteraan masyarakat jajahan, yang kemudian dituangkan dalam program *Trias Van*

³³ "Verslag over de Gezamenlijke Islamitische Feestvieringen in de Lampongsche Districten, 1910, ANRI Inventaris 2.10.36, No. 365, Hlm. 5,"

³⁴ I. J. Brugmans, *Geschiedenis van Het Onderwijs in Nederlandsch-Indië* (Groningen: J.B. Wolters, 1938), Hlm. 156-160..

Deventer: Irigasi (pengairan), Imigrasi (emigrasi/kolonisasi), dan Edukasi (pendidikan).³⁵

Di antara ketiganya, program emigrasi dipandang sebagai instrumen krusial untuk meredakan tekanan demografis dan kemiskinan struktural di Jawa, yang telah memicu berbagai masalah sosial seperti pengangguran dan kejahatan. Namun, di balik wajah humanis ini, program ini juga mengemban kepentingan ekonomi kolonial: menyediakan tenaga kerja murah untuk membuka dan mengolah lahan-lahan perkebunan baru di Sumatera, sebagaimana tercatat dalam praktik pengiriman koeli kontrak (Kari Z Pelzer, *Koeli Kontrak*). Selain didorong oleh pertimbangan ideologis Politik Etis, perumusan kebijakan emigrasi juga didasarkan pada serangkaian studi administratif dan teknis yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Studi-studi tersebut mencakup pemetaan wilayah tujuan, analisis daya dukung lahan, ketersediaan sumber air, hingga perhitungan biaya transportasi dan logistik pemindahan penduduk. Dengan demikian, emigrasi tidak dilaksanakan secara spontan, melainkan melalui tahapan perencanaan yang sistematis dan terukur dalam kerangka birokrasi kolonial.

Mekanisme perekrutan emigran dilakukan secara ketat dan selektif oleh pemerintah kolonial melalui *Directie der Kolonisatie*. Calon kolonis direkrut dari kalangan petani gurem yang memenuhi kriteria utama: kepatuhan (*goed gedrag*), kesehatan fisik, dan pengalaman bertani sawah. Namun, tantangan terbesar pemerintah kolonial adalah rendahnya minat orang Jawa untuk pindah ke luar Jawa, karena mereka sangat terikat secara emosional dan kultural dengan tanah leluhurnya.³⁶ Untuk mengatasi kendala ini, pemerintah kolonial mengembangkan strategi rekrutmen yang sistematis:

a. Sistem "Bedol Desa"

Pemerintah kolonial menerapkan sistem bedol desa, yakni memindahkan seluruh penduduk dari satu desa tertentu di Jawa ke Lampung dan menempatkan mereka di lokasi yang sama. Strategi ini dimaksudkan agar para emigran tidak terasing dari

³⁵ "Aan Budianto, 'Keeanga Sosial Di Lampung Akibat Program Transmigrasi Di Era 1950an,' Jurnal Candi 20, No. 1 (2020): 18-31,"

³⁶ "Staatsblad van Nederlandsch-Indië No. 123 (1911): 'Regeling Der Emigratie van Java Naar de Buitengewesten,'* Hlm. 1-15,"

lingkungan sosial dan budaya Jawa. Dengan kata lain, kebijakan ini merupakan "*cut and paste* Jawa di Lampung."³⁷ Desa Bagelen di Gedong Tataan, yang berasal dari daerah Bagelen di Kedu, Jawa Tengah, merupakan contoh paling konkret dari penerapan sistem ini.³⁸

b. Peran Aparat Desa di Jawa

Aparat desa seperti lurah dan bekel memainkan peran kunci dalam proses rekrutmen. Mereka bertugas melakukan pendataan calon emigran, memberikan penyuluhan, dan meyakinkan warga untuk bersedia pindah. Dalam banyak kasus, aparat desa menjadi perantara antara pemerintah kolonial dan masyarakat petani.

c. Propaganda dan Janji-Janji Manis

Pemerintah kolonial melakukan promosi besar-besaran melalui tiga cara: (1) penyuluhan oleh aparat pemerintah di Jawa; (2) pemulangan emigran lama ke kampung halaman untuk memberikan kesaksian tentang keberhasilan mereka di Lampung; dan (3) pemutaran film "Tanah Sabrang" karya Mannur Franken antara tahun 1938-1941 yang menggambarkan Lampung sebagai daerah subur dengan hasil padi melimpah dan sistem bawon yang menguntungkan. Film ini menampilkan "Tanah Sabrang" Lampung sebagai tempat penuh harapan dan kesejahteraan yang lebih baik.⁹

d. Janji Tanah dan Jaminan Hidup Awal

Setiap kepala keluarga yang bersedia pindah dijanjikan lahan garapan seluas 1-2 hektar, rumah tempat tinggal, serta jaminan bahan makanan pokok selama dua tahun pertama. Selain itu, mereka juga mendapatkan premi tunai sebesar 20 gulden per kepala keluarga, alat-alat rumah tangga, dan alat-alat pertanian dasar. Total biaya yang dikeluarkan pemerintah diperkirakan mencapai 300 gulden per kepala keluarga, belum termasuk investasi infrastruktur seperti jalan dan irigasi.¹⁰

e. Unsur Paksaan Terselubung

Meskipun secara formal program emigrasi bersifat sukarela, terdapat indikasi paksaan terselubung dalam pelaksanaannya.

³⁷ "Hamid, 'Emigrasi Pertanian Jawa Di Lampung,' 2025,"

³⁸ "Oyos Saroso H.N., 'Sejarah Transmigrasi Di Lampung: Mereka Datang Dari Bagelen,' Teraslampung.Com, 6 Februari 2014.,"

Tekanan ekonomi yang dialami petani gurem di Jawa dengan lahan yang semakin sempit dan kesempatan kerja yang minim membuat mereka tidak memiliki pilihan lain selain menerima tawaran emigrasi. Dengan kata lain, "kerelaan" mereka lebih disebabkan oleh situasi struktural yang memaksa, bukan semata-mata karena daya tarik program.¹¹

Pemerintah kolonial memandang emigrasi sebagai solusi jangka panjang terhadap persoalan kepadatan penduduk di Jawa yang dianggap telah mencapai titik kritis. Pulau Jawa digambarkan sebagai wilayah dengan tekanan agraris tinggi akibat pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding dengan ketersediaan lahan pertanian. Sementara itu, wilayah luar Jawa, khususnya Sumatera, dipersepsikan sebagai daerah yang masih "kosong" dan potensial untuk dikembangkan, meskipun dalam kenyataannya wilayah tersebut telah dihuni dan dikelola oleh masyarakat adat setempat.

Dalam konteks tersebut, Lampung menempati posisi strategis dalam rencana kolonisasi. Letaknya yang relatif dekat dengan Jawa, akses transportasi laut yang memadai, serta potensi agraris yang dinilai tinggi menjadikan Lampung sebagai laboratorium awal kebijakan emigrasi kolonial. Oleh karena itu, pemerintah kolonial menugaskan sejumlah pejabat dan ahli untuk menyusun skema kolonisasi yang mencakup jumlah calon emigran, pembagian lahan, pola permukiman, serta mekanisme pengawasan administratif.³⁹

Sebelum emigrasi dari Jawa ke Lampung dilaksanakan secara konkret, pemerintah kolonial Belanda terlebih dahulu melakukan serangkaian kajian dan perencanaan yang bersifat administratif, demografis, dan ekonomis. Proses ini melibatkan pengumpulan data mengenai kepadatan penduduk di Jawa, ketersediaan lahan di wilayah tujuan, serta potensi ekonomi yang dapat dikembangkan melalui pemindahan penduduk. Perencanaan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan emigrasi tidak lahir secara spontan, melainkan merupakan hasil dari pemikiran birokratis yang panjang dan terstruktur. Dalam kerangka ini, emigrasi diposisikan sebagai bagian dari strategi kolonial untuk mengelola penduduk dan sumber daya wilayah jajahan

³⁹ D.H. Burger, *Sociologisch-Economische Geschiedenis van Indonesië* (Wageningen: Landbouwhogeschool, 1975), Jilid 2, Hlm. 45-50.

secara lebih efisien. Oleh karena itu, analisis terhadap dokumen perencanaan awal menjadi penting untuk memahami bagaimana emigrasi dikonsepkan sejak awal sebagai proyek negara kolonial.⁴⁰

2. Proses Pemindahan dan Penempatan

a. Jalur dan Tahapan Pemindahan

Proses pemindahan emigran dari Jawa ke Lampung dilakukan secara bertahap dan terorganisir:

1. Tahap Persiapan di Jawa: Para emigran dikumpulkan di tempat-tempat penampungan sementara, menjalani pemeriksaan kesehatan, dan mendapatkan pengarahan sebelum keberangkatan.
2. Transportasi Darat: Dari pedalaman Jawa Tengah, mereka diangkut menggunakan kereta api menuju Batavia.
3. Transportasi Laut: Dari Batavia, mereka naik kapal laut menuju Pelabuhan Panjang atau Pelabuhan Teluk Betung di Lampung. Pemilihan Lampung sebagai tujuan pertama didasarkan pada pertimbangan kedekatan geografis dengan Jawa, biaya transportasi yang lebih murah, serta keberadaan jalur pelayaran utama milik KPM (*Koninklijke Paketvaart Maatschappij*).
4. Transit di Pelabuhan: Sesampainya di Pelabuhan Teluk Betung, para emigran transit terlebih dahulu untuk mendapat pengarahan dari pemerintah kolonial sekaligus pembagian alat pertanian dan logistik.
5. Perjalanan Darat ke Lokasi: Dari pelabuhan, para kolonis berjalan kaki menuju lokasi permukiman di Gedong Tataan yang berjarak lebih dari 70 km. Perjalanan ini ditempuh selama tiga hari dua malam dengan membawa barang-barang bawaan dipikul sendiri.⁴¹

b. Gelombang Kedatangan

Kedatangan gelombang pertama terjadi pada November 1905, dengan jumlah 155-200 kepala keluarga dari Kedu. Pemerintah kolonial kemudian menghentikan sementara

⁴⁰ J. M. van Der Kroef, "The Indonesian City: Its Culture and Evolution," *Asian Survey* 1, No. 10 (1961): 23-31.,

⁴¹ "Sejarah Transmigrasi Orang-Orang Jawa Ke Lampung," Merdeka.Com, 27 Juli 2022,"

program emigrasi pada tahun 1913 karena kesulitan mendapatkan calon emigran yang memenuhi kuota. Program kembali dilanjutkan pada tahun 1919 setelah kondisi permukiman menunjukkan perbaikan signifikan, dan sejak saat itu semakin banyak emigran yang datang atas biaya sendiri.⁴²

c. Pola Penempatan dan Pembagian Lahan

Setibanya di lokasi, para emigran langsung menjalani proses penempatan yang terstruktur:

1. Pembukaan Lahan: Tugas pertama para kolonis adalah membuka hutan untuk dijadikan lahan permukiman dan pertanian. Pekerjaan ini dilakukan secara gotong royong.
2. Pembangunan Rumah: Pemerintah kolonial menyediakan bahan bangunan dan para kolonis membangun rumah-rumah bedeng beratap seng atau asbes secara swadaya.
3. Pembagian Kavling Tanah: Setiap keluarga kolonis mendapatkan jatah lahan permukiman dan lahan garapan (rata-rata 1-2 hektar) dengan sertifikat sementara yang dikeluarkan pemerintah kolonial.
4. Pembangunan Infrastruktur Desa: Desa-desa koloni dirancang dengan tata ruang teratur, pola persawahan intensif, dan sistem irigasi teknis yang terhubung ke sumber air. Pola ini sangat kontras dengan sistem perladangan berpindah masyarakat Lampung.⁴³

3. Posisi dan Respons Masyarakat Lampung

a. Dampak Kebijakan Emigrasi terhadap Penduduk Lokal

Kedatangan kolonis Jawa membawa dampak signifikan terhadap masyarakat Lampung, terutama dalam hal penguasaan tanah. Lahan-lahan yang sebelumnya merupakan tanah ulayat marga secara bertahap beralih status menjadi tanah yang dialokasikan untuk kolonisasi. Dalam laporan *Memorie van Overgave* tahun 1915, disebutkan bahwa para Penyimbang di Gedong Tataan keberatan dengan pengambilalihan tanah ulayat,

⁴² “Saroso, ‘Mereka Datang Dari Bagelen,’ 2014; ‘Sejarah Transmigrasi Orang-Orang Jawa Ke Lampung,’ 2022,”

⁴³ “ANRI, Algemene Secretarie, Grote Bundel Besluit No. 1677, Hlm. 18-21,”

namun protes mereka "dapat diredakan dengan kompensasi terbatas dan jaminan bahwa tanah adat yang tidak digunakan akan tetap berada di bawah otoritas marga."⁴⁴

b. Mekanisme Pengalihan Tanah Adat

Pengalihan tanah adat untuk kepentingan kolonisasi dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan otoritas adat. Pemerintah kolonial bernegosiasi dengan para Penyimbang untuk mendapatkan lahan yang akan digunakan sebagai permukiman dan lahan pertanian kolonis. Para Penyimbang yang bersedia bekerja sama dengan pemerintah kolonial mendapatkan kompensasi berupa pengakuan administratif, perlindungan politik, atau akses ekonomi tertentu. Namun, kerja sama ini juga berpotensi melemahkan legitimasi mereka di mata masyarakat adat karena dianggap berkompromi dengan kekuasaan kolonial.⁴⁵

c. Respons Elit Adat: Antara Negosiasi dan Resistensi

Para Penyimbang menunjukkan respons yang bervariasi terhadap kebijakan kolonisasi. Sebagian memilih beradaptasi dan bekerja sama dengan pemerintah kolonial, terutama dalam proses pengadaan lahan. Sebagian lain menunjukkan resistensi pasif melalui protes-protes terbatas, meskipun tidak sampai pada perlawanan terbuka karena kekuatan militer kolonial yang dominan.⁴⁶

d. Bentuk Penerimaan dan Adaptasi Masyarakat Lokal

Pada level masyarakat biasa, terutama golongan Menyimah, respons terhadap kehadiran kolonis Jawa lebih bersifat pragmatis. Sebagian dari mereka bekerja sebagai buruh tani di sawah-sawah kolonis dengan sistem bagi hasil (*maro* atau *mertelu*). Hubungan ini bersifat simbiotik namun timpang, di mana masyarakat lokal mendapatkan manfaat ekonomi namun kehilangan akses terhadap tanah yang semakin menyempit.⁴⁷

⁴⁴ "Petrik Matanasi, 'Gedong Tataan Lokasi Transmigrasi Pertama,' Historia.Id, 13 Mei 2025,"

⁴⁵ "ANRI, Memorie van Overgave van Den Assistent-Resident Der Lampongsche Districten, 1915, Inventaris 2.10.39, No. 102, Hlm. 24,"

⁴⁶ "Mohammad Medani Bahagianda, 'Sejarah Penyimbang Dalam Tradisi Sai Batin Dan Pepadun (Seri 5),' Nataragung.Id, 2 Juli 2025,"

⁴⁷ "Vivit Nurdin Dan Bartoven, 'Land of Hope and Land of the Lost: Study of Power Relations and Local Wisdom Ethnic Lampung,' International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 2018, Hlm. 30-32,"

Perencanaan teknis emigrasi tidak berhenti pada penetapan kebijakan makro, melainkan dilanjutkan dengan penyusunan instrumen administratif yang sangat rinci. Pemerintah kolonial melalui *Directie der Kolonisatie* membentuk tim khusus yang bertugas melakukan survei kelayakan, pemetaan wilayah, dan perhitungan kebutuhan logistik. Dalam laporannya tahun 1904, H.G. Heyting selaku pejabat yang ditugaskan menyelidiki kemungkinan kolonisasi di Lampung, menyusun rekomendasi teknis yang mencakup jumlah ideal kolonis per gelombang, luas lahan yang dibutuhkan, hingga perkiraan biaya transportasi dan pembangunan infrastruktur dasar.¹ Rekomendasi ini kemudian menjadi bahan pertimbangan utama bagi Gubernur Jenderal dalam mengambil keputusan final. Tingkat kerincian perencanaan ini menunjukkan bahwa negara kolonial tidak bekerja secara serampangan, melainkan mengoperasikan mesin birokrasinya secara efisien untuk memastikan setiap tahap program berjalan sesuai target yang ditetapkan.

Gambaran mengenai keseriusan dan kompleksitas perencanaan emigrasi tersebut dapat dilihat dari dokumen-dokumen awal yang memuat saran, pertimbangan, serta hasil penyelidikan resmi pemerintah kolonial. Dokumen ini tidak hanya mencerminkan tujuan kebijakan, tetapi juga memperlihatkan cara pandang kolonial terhadap penduduk Jawa sebagai objek yang dapat dipindahkan dan diatur demi kepentingan administrasi serta ekonomi kolonial. Dalam konteks tersebut, pemerintah kolonial memandang emigrasi bukan semata sebagai solusi kepadatan penduduk di Jawa, melainkan sebagai instrumen strategis untuk mengatur distribusi penduduk dan optimalisasi wilayah jajahan. Kebijakan ini disusun berdasarkan kalkulasi administratif dan ekonomi yang cermat, sehingga setiap tahap pelaksanaannya memerlukan dasar perencanaan tertulis yang kuat. Oleh karena itu, keberadaan dokumen perencanaan resmi menjadi bukti awal bagaimana program emigrasi dikonstruksi secara sistematis oleh negara kolonial sebelum diwujudkan di lapangan. Hasil dari proses perencanaan tersebut kemudian dituangkan dalam berbagai dokumen resmi pemerintah kolonial yang bersifat rekomendatif maupun normatif. Dokumen-dokumen ini menjadi dasar pengambilan keputusan politik dan administratif dalam pelaksanaan emigrasi dari Jawa ke Lampung. Salah satu dokumen

penting yang mencerminkan tahap awal perencanaan emigrasi adalah skema perencanaan yang disusun pada awal abad ke-20, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 2.4 Saran dan pertimbangan tanggal 29 Januari 1904 atas penyelidikan tanggal 16 Januari 1904 No.254 mengenai "Schema Perencanaan Emigrasi dari Jawa dengan suatu Penaksiran"



Sumber: ANRI, *Algemene Secretarie seri Grote Bundel Besluit No. 1677*

Dokumen perencanaan awal ini membuktikan bahwa program kolonisasi telah dirancang dengan sangat matang, detail, dan birokratis jauh sebelum pelaksanaannya, menunjukkan sifat program sebagai sebuah rekayasa sosial terencana.⁴⁸

Berdasarkan *Gouvernementsbesluit* tanggal 21 Mei 1905 No. 28, Lampung secara resmi ditetapkan sebagai daerah tujuan kolonisasi. Pelaksanaan teknis program ini berada di bawah tanggung jawab Directie der Kolonisatie. Berdasarkan laporan dan rekomendasi dari pejabat seperti H.G. Heyting yang ditugaskan menyelidiki kelayakan pemindahan penduduk Gedong Tataan akhirnya terpilih

⁴⁸ *Kolonisatieverslag van Nederlandsch-Indië 1905-1930 (Weltevreden: Landsdrukkerij, 1931), Hlm. 23-30.,*

sebagai lokasi kolonisasi pertama dan paling utama (*hoofdplaats*). Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan agronomis (kesuburan tanah dan ketersediaan air dari Way Sekampung) serta sosiologis (keberadaan struktur sosial masyarakat adat yang dianggap stabil).⁴⁹

Mekanisme perekrutan emigran dilakukan secara ketat dan selektif oleh pemerintah kolonial. Calon kolonis direkrut dari kalangan petani gurem di daerah-daerah padat dan miskin di Jawa Tengah, seperti Kedu, Bagelen, Semarang, dan Yogyakarta. Kriteria utama adalah kepatuhan (*goed gedrag*), kesehatan fisik, dan pengalaman bertani sawah. Mereka tidak hanya dipindahkan secara fisik, tetapi secara sengaja "dibekali" dan dipertahankan struktur sosial serta budaya asal mereka untuk memudahkan pengelolaan. Setelah melalui proses seleksi, para emigran beserta keluarganya dipindahkan menggunakan kapal laut menuju Pelabuhan Panjang di Lampung, sebelum kemudian diangkut lebih lanjut ke Gedong Tataan.⁵⁰

C. Pelaksanaan dan Pola Awal Kolonisasi di Gedong Tataan (1905–1928)

Pelaksanaan kolonisasi pertama secara fisik dimulai pada tahun 1905 di Desa Bagelen, Gedong Tataan, yang terletak sekitar 25 km di sebelah barat Tanjungkarang menuju Kota Agung, tepatnya di kaki Gunung Betung. Pembangunan desa koloni perintis ini ditangani langsung oleh H.G. Heyting. Strategi yang diterapkan Heyting sangat psikologis dan praktis: membangun permukiman baru itu "menurut pola dari Jawa" untuk menciptakan rasa nyaman dan familiar bagi para kolonis. Pola "Jawa" ini diwujudkan dalam beberapa aspek fundamental:⁵¹

1. Struktur Pemerintahan Desa

Dibentuklah pemerintahan desa ala Jawa yang terpisah sama sekali dari struktur adat Lampung. Diangkatlah Lurah, *Carik*

⁴⁹ S. K. Hetami, "Emigrasi Ke Lampung: Kebijakan Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Lokal 1905-1942," *Jurnal Sejarah Dan Budaya* 10, No. 2 (2016): 145-162.No Title,

⁵⁰ *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* No. 123 (1911): "Regeling Der Emigratie van Java Naar de Buitengewesten," Hlm. 1-15.

⁵¹ "Lgemeen Handelsblad, 8 Desember 1906, Hlm. 2; Museum Nasional Ketransmigrasian, 'Sejarah Transmigrasi,' Hlm. 12; Petrik Matanasi, 'Gedong Tataan Lokasi Transmigrasi Pertama,' *Historia*.Id, 13 Mei 2025,"

(sekretaris desa), dan Kamitua untuk memimpin dan mengadministrasikan permukiman koloni. Pembentukan otoritas paralel ini secara efektif menciptakan *enklave* politik dan sosial di tengah-tengah wilayah adat Lampung. Dalam pelaksanaan kolonisasi pertanian Jawa di wilayah Gedong Tataan, pemerintah kolonial Belanda membentuk struktur pemerintahan desa yang sepenuhnya mengadopsi sistem administrasi Jawa dan terpisah dari struktur adat Lampung. Pemerintahan desa ini dirancang mengikuti pola desa administratif di Jawa, dengan pengangkatan pejabat-pejabat seperti Lurah sebagai kepala desa, Carik sebagai sekretaris desa yang bertanggung jawab atas administrasi dan pencatatan, serta Kamitua yang berperan dalam pengawasan dan pelaksanaan kebijakan di tingkat dusun. Para pejabat ini umumnya berasal dari kalangan kolonist Jawa atau individu yang dianggap loyal dan mampu menjalankan perintah administrasi kolonial.⁵²

Desa pertama yang dibentuk adalah Desa Bagelen pada tahun 1905, dinamai sesuai daerah asal kolonis di Bagelen, Purworejo, Jawa Tengah.³ Pemerintahan desa ini dirancang mengikuti pola desa administratif di Jawa dengan pengangkatan pejabat-pejabat lokal: Lurah sebagai kepala desa, Carik sebagai sekretaris desa yang bertanggung jawab atas administrasi dan pencatatan, serta Kamitua yang berperan dalam pengawasan dan pelaksanaan kebijakan di tingkat dusun.⁵³ Data konkret dari lapangan menunjukkan bahwa struktur pemerintahan desa ini berkembang seiring perluasan permukiman. Setelah Desa Bagelen terbentuk, pemerintah kolonial kemudian membentuk sejumlah dusun untuk menunjang administrasi pemerintahan desa, yaitu Dusun Karanganyar pada tahun 1907 dan Dusun Kutoarjo pada tahun 1910.⁵⁴ Kedua dusun ini juga dinamai sesuai daerah asal kolonis

⁵² Gusti Anshari Syah, "*Kebijakan Agraria Kolonial Belanda Dan Dampaknya Terhadap Struktur Kepemilikan Tanah Di Jawa (1870-1942)*," *Jurnal Sejarah Citra Lekha* 5, No. 1 (2020): 45-60.,

⁵³ "Soerabaijasch Handelsblad, 14 Mei 1907, Hlm. 3; Bandingkan Dengan Pola Pemerintahan Desa Di Jawa Dalam Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia, 1992), Hlm. 78-80,"

⁵⁴ "Wagiso (Kepala Desa Bagelen 1980-2007), Wawancara Dalam Kompas.Id, 'Harmoni Dalam Kemajemukan,' 20 April 2018,"

di Jawa Tengah Karanganyar dan Kutoarjo. Pada awal 2000-an, ketika terjadi pemekaran wilayah, Karanganyar dan Kutoarjo kemudian menjadi desa tersendiri, yang hingga kini masih dapat dilacak keberadaannya di Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.⁵⁵

Pembentukan pemerintahan desa ala Jawa ini secara sengaja mengabaikan dan tidak mengintegrasikan struktur kepemimpinan adat Lampung, seperti penimbang dan perangkat adat marga. Akibatnya, sistem pemerintahan desa kolonial berdiri sebagai otoritas baru yang beroperasi di luar dan terlepas dari sistem adat setempat. Kondisi ini menciptakan dua sistem kekuasaan yang berjalan berdampingan namun terpisah: di satu sisi pemerintahan adat Lampung yang berlandaskan norma tradisional, dan di sisi lain pemerintahan desa kolonial yang berlandaskan hukum dan administrasi kolonial. Keberadaan struktur pemerintahan desa kolonial tersebut secara efektif membentuk *enklave* politik dan sosial di tengah wilayah adat Lampung. Desa-desa koloni Jawa berfungsi sebagai unit administratif tersendiri yang memiliki mekanisme pengambilan keputusan, sistem hukum, dan tata kelola internal yang berbeda dari masyarakat adat sekitarnya. *Enklave* ini tidak hanya membatasi interaksi politik antara penduduk koloni dan masyarakat adat Lampung, tetapi juga mempertegas segregasi sosial yang berdampak jangka panjang terhadap relasi kekuasaan, pengelolaan tanah, serta dinamika konflik agraria di wilayah Gedong Tataan pada masa-masa berikutnya.

2. Penamaan Toponim

Penamaan toponim di wilayah koloni Jawa di Gedong Tataan merupakan bagian penting dari strategi sosial dan kultural dalam pelaksanaan kolonisasi pertanian. Pemerintah kolonial secara sengaja mempertahankan, bahkan mereplikasi, nama-nama tempat yang berasal dari daerah asal para kolonis di Jawa. Kebijakan ini tidak bersifat kebetulan, melainkan dimaksudkan untuk memperkuat identitas kolektif para pendatang serta

⁵⁵ “Arsip Nasional Republik Indonesia, Memorie van Overgave van Den Assistent-Resident Der Lampongsche Districten, 1915, Inventaris 2.10.39, No. 102, Hlm. 23-25,”

menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap wilayah permukiman baru yang mereka tempati. Dengan membawa serta nama-nama yang familiar, kolonis Jawa diharapkan dapat lebih cepat beradaptasi dan membangun ikatan emosional dengan lingkungan baru. Contoh paling jelas dari praktik ini adalah penamaan Desa Bagelen di wilayah Gedong Tataan, yang secara langsung mereplikasi nama daerah Bagelen di Kedu, Jawa Tengah, tempat asal sebagian besar kolonis generasi awal. Penamaan tersebut berfungsi sebagai pengingat asal-usul geografis dan kultural kolonis, sekaligus sebagai simbol keberlanjutan identitas Jawa di tanah perantauan. Dalam konteks ini, toponim tidak hanya berperan sebagai penanda geografis, tetapi juga sebagai medium simbolik yang mereproduksi memori kolektif dan solidaritas sosial di antara para pendatang.

Lebih jauh, praktik penamaan toponim ala Jawa ini turut mempertegas terbentuknya ruang sosial yang terpisah dari masyarakat adat Lampung. Penggunaan nama-nama Jawa pada wilayah koloni berimplikasi pada marginalisasi toponim lokal Lampung, sekaligus menegaskan dominasi budaya pendatang dalam ruang yang secara historis merupakan wilayah adat. Dengan demikian, penamaan toponim dapat dipahami sebagai bagian dari proses konstruksi identitas dan kekuasaan kolonial, yang tidak hanya mengatur ruang fisik, tetapi juga membentuk lanskap simbolik dan kultural di Gedong Tataan.⁵⁶

3. Sistem Pertanian

Dalam rangka mendukung keberhasilan kolonisasi pertanian Jawa di Gedong Tataan, pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan dan sekaligus memaksakan penerapan sistem persawahan intensif dan menetap ala Jawa. Kebijakan ini secara resmi dituangkan dalam Gouvernementsbesluit tanggal 21 Mei 1905 No. 28 yang menetapkan Lampung sebagai daerah tujuan kolonisasi, dengan instruksi teknis untuk mengembangkan sistem persawahan irigasi sebagaimana dipraktikkan di Jawa.⁵⁷ Laporan

⁵⁶ Febriana Khoiriyah, Ardian Fahri, and Bimo Bramantio, "Sejarah Toponimi Daerah Transmigrasi Provinsi Lampung Melalui Tuturan Tradisi Lisan Pendahuluan," 1903, 221–40.

⁵⁷ "Staatsblad van Nederlandsch-Indië No. 28 (1905): 'Besluit van Den Gouverneur-

H.G. Heyting tahun 1904 yang menjadi dasar kebijakan tersebut secara eksplisit merekomendasikan penerapan sistem pertanian menetap dengan irigasi teknis, berbeda dengan sistem perladangan tradisional yang dipraktikkan masyarakat setempat.⁵⁸

Data dari *Koloniale Verslagen* (Laporan Tahunan Hindia Belanda) menunjukkan bahwa pada tahun 1905-1906, pemerintah kolonial mengalokasikan dana sebesar 300 gulden per kepala keluarga kolonis untuk pembukaan lahan, pembangunan irigasi, dan penyediaan alat-alat pertanian. Dalam catatan Lim Bouw Soei (1910), para kolonis di Desa Bagelen telah mendirikan tempat penggilingan padi untuk mendukung aktivitas pertanian intensif mereka.⁵⁹

Sistem persawahan menetap ini berbeda secara fundamental dengan sistem perladangan berpindah yang sebelumnya dipraktikkan oleh masyarakat adat Lampung. Laporan *Adat-Instellingen Der Lampongsche Districten* (1910) menjelaskan bahwa masyarakat Lampung mempraktikkan sistem huma atau ladang berpindah sebagai adaptasi ekologis terhadap kondisi lingkungan, di mana lahan dibuka, ditanami untuk 2-3 musim, kemudian ditinggalkan selama 5-10 tahun untuk memulihkan kesuburan tanah. Komoditas utama mereka adalah lada (*Piper nigrum*) yang menjadi "emas hitam" Lampung dalam perdagangan regional sejak abad ke-17, serta padi ladang dan kopi.⁶⁰

Penerapan sistem persawahan ala Jawa di Gedong Tataan menghadapi kendala teknis serius pada tahun-tahun awal. Laporan *Soerabaijasch Handelsblad* (14 Mei 1907) mengungkapkan bahwa lahan yang semula direncanakan sebagai

Generaal van Nederlandsch-Indië van 21 Mei 1905, *Betreffende de Kolonisatie van Javaansche Landbouwers in de Buitengewesten**; Lihat Juga ANRI, *Algemene Secretarie, Grote Bundel* ,”

⁵⁸ “ANRI, *Algemene Secretarie, Grote Bundel Besluit No. 1677: ‘Advies En Overwegingen Betreffende Het Emigratieplan van Java Naar de Lampongsche Districten,’* 29 Januari 1904, Hlm. 8-10.”

⁵⁹ “*Koloniale Verslagen 1905-1906** (Batavia: Landsdrukkerij, 1907), Hlm. 234-236; Lihat Juga J. van Den Berg, *De Kolonisatie Der Javanen in de Buitengewesten* (Wageningen: H. Veenman & Zonen, 1939), Hlm. 112-115,”

⁶⁰ “H. Wahyu Iryana, ‘Lampung: Dari Lada Kolonial Hingga Kopi Robusta Mendunia,’ MUI Lampung Digital, 20 November 2025, <https://Lampung.Mui.or.Id/?P=19356>,”

sawah basah (wet rice fields) terpaksa ditanami sebagai ladang kering (*dry fields*) akibat kekurangan air untuk irigasi.⁷ Baru setelah beberapa tahun, ketika sistem irigasi dari Way Sekampung berhasil dikembangkan, hasil padi mulai meningkat signifikan. Keberhasilan teknis ini menjadi salah satu faktor yang mendorong pemerintah kolonial melanjutkan program kolonisasi setelah sempat dihentikan pada 1913.⁸

Dampak ekologis dan sosial dari pemaksaan sistem pertanian ini tercatat dalam berbagai laporan kolonial. *Memorie van Overgave* Residen Lampung tahun 1915 menyebutkan adanya protes dari beberapa Penyimbang terkait berkurangnya aliran air ke ladang mereka di hilir akibat bendungan dan saluran irigasi yang dibangun untuk sawah kolonis. Konflik distribusi air ini menjadi sumber ketegangan laten antara komunitas kolonis Jawa dan masyarakat adat Lampung, terutama pada musim kemarau ketika ketersediaan air menipis.⁶¹

Implikasi sosial dari transformasi agraria ini juga terekam dalam laporan *Koloniale Verslagen* tahun 1918, yang mencatat bahwa perluasan sawah kolonis secara bertahap mengurangi akses masyarakat Lampung terutama golongan Menyimah terhadap tanah ulayat yang sebelumnya dapat mereka garap. Sebagian dari mereka kemudian bekerja sebagai buruh tani di sawah-sawah kolonis dengan sistem bagi hasil (*maro* atau *mertelu*), sebuah pola hubungan ekonomi yang bersifat simbiotik namun timpang.⁶² Dari sisi produktivitas, sistem persawahan intensif terbukti mampu meningkatkan hasil pertanian secara signifikan. Laporan tahun 1916 mencatat bahwa luas sawah basah di wilayah kolonisasi Gedong Tataan telah mencapai 700 bau (sekitar 490 hektar). Pada dekade 1920-an, kolonis Jawa tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri, tetapi juga memasok beras kepada masyarakat Lampung yang semakin

⁶¹ “Agus Riyanto, ‘Dinamika Konflik Dan Kolaborasi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Lahan Pertanian Gedong Tataan, 1915-1930,’ *Jurnal Agraria Dan Pertahanan* 8, No. 2 (2023): Hlm. 156-174,”

⁶² “ANRI, *Memorie van Overgave van Den Assistent-Resident Der Lampongsche Districten*, 1915, *Inventaris* 2.10.39, No. 102, Hlm. 24-25.,”

banyak mengalihkan lahannya untuk tanaman lada dan kopi yang lebih menguntungkan secara ekonomi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pertanian kolonial tidak bersifat netral, melainkan sarat dengan kepentingan kekuasaan dan pengendalian sosial. Melalui penerapan sistem persawahan ala Jawa, pemerintah kolonial secara simultan membentuk pola produksi, struktur kepemilikan tanah, serta relasi sosial di wilayah Gedong Tataan. Kebijakan ini berimplikasi pada melemahnya otoritas adat dalam pengelolaan lahan karena tanah ulayat yang semula berada di bawah kendali Penyimbang secara bertahap beralih menjadi tanah garapan individual yang diatur oleh administrasi kolonial serta mengubah lanskap agraria lokal menjadi lebih terintegrasi dengan kebutuhan ekonomi kolonial. Masyarakat Lampung, terutama dari lapisan Menyimah, semakin terdorong ke posisi subordinat dalam tatanan sosial-ekonomi yang baru, baik sebagai buruh tani di sawah kolonis maupun sebagai

D. Adaptasi, Interaksi Awal, dan Pembentukan *Enklave Jawa* (1905–1930)

Masa awal kolonisasi (1905–1930) merupakan fase kritis adaptasi fisik dan konsolidasi sosial. Para kolonis Jawa, dengan bantuan logistik dan teknis dari pemerintah, berhadapan dengan tugas membuka hutan, membangun rumah permanen, dan mengembangkan sistem persawahan di lingkungan baru. Interaksi dengan masyarakat Lampung sebagai pemilik ulayat awal tak terhindarkan, terutama dalam hal akses dan pengelolaan sumber daya seperti air (Way Sekampung), lahan marginal, serta dalam transaksi ekonomi di pasar-pasar lokal. Namun, kebijakan segregasi permukiman dan dualisme administratif yang sengaja diciptakan Belanda secara efektif membatasi interaksi sosial-budaya yang lebih mendalam dan setara antara kedua komunitas. Laporan *Memorie van Overgave* tahun 1918 dari Asisten Residen Lampung (kode inventaris ANRI 2.10.39 No. 105) pada halaman 15-18 menjelaskan tentang kebijakan segregasi administratif. Pejabat Asisten Residen yang menyusun laporan ini meskipun namanya tidak tercantum dalam dokumen mencatat bahwa desa-desa koloni seperti Bagelen, Karanganyar, dan Kutoarjo sengaja

dibangun sebagai unit administratif terpisah dari struktur marga Lampung. Tujuannya, sebagaimana ditulisnya di halaman 17, adalah "untuk memudahkan pengawasan dan mencegah potensi konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan adat dan kebiasaan."⁶³

Interaksi dengan masyarakat Lampung sebagai pemilik ulayat awal tercatat dalam berbagai laporan kolonial. Menurut catatan *Adat-Instellingen Der Lampongsche Districten* (1910) yang diterbitkan oleh *Kantoor Voor Inlandsche Zaken* (Kantor Urusan Pribumi), masyarakat adat Lampung memiliki hak ulayat atas tanah di wilayah Gedong Tataan yang diatur melalui otoritas Penyimbang. Laporan ini menjelaskan secara rinci struktur adat, sistem kepemilikan tanah, dan hierarki sosial masyarakat Lampung di distrik-distrik Lampung, termasuk wilayah Gedong Tataan. Pada halaman 16-18, disebutkan bahwa: "Tanah dalam masyarakat Lampung tidak dapat dijual atau dialihkan kepada pihak luar marga tanpa persetujuan seluruh anggota marga yang dipimpin oleh Penyimbang. Hak atas tanah melekat pada keanggotaan marga, bukan pada individu."⁶⁴

Gambar 2.3: Perkampungan kolonisasi pertama, Lampung (1930)



Sumber: ANRI, KIT No. 315-12

⁶³ *Verslag over de Kolonisatie van Javaansche Emigranten in de Lampongsche Districten over Het Jaar 1909* (Batavia: Landsdrukkerij, 1910), Hlm. 15-18

⁶⁴ "Adat-Instellingen Der Lampongsche Districten (Batavia: Kantoor Voor Inlandsche Zaken, 1910), Hlm. 16-18.,"

Keterangan: Potret udara atau lanskap ini dengan jelas menunjukkan tata letak teratur dan terkonsentrasi dari permukiman kolonis Jawa, memperkuat narasi tentang pembentukan "*enklave*" yang terpisah secara visual dari lingkungan sekitarnya.

Baru setelah tahun 1928, ketika institusi Marga diakui resmi sebagai *inlandse gemeente* (setingkat gemeente atau kelurahan untuk pribumi) oleh pemerintah kolonial, terjadi sedikit pergeseran kebijakan. Kolonisasi baru setelah tahun itu mulai ditempatkan di dalam wilayah administratif marga dan secara hierarkis dibawahkan kepada pemerintahan marga. Perubahan kebijakan ini menandai dimulainya fase integrasi administratif yang lebih kompleks, meskipun secara sosio-kultural, *enklave* Jawa yang telah terbentuk selama seperempat abad tetap berdiri kokoh dengan identitasnya yang berbeda.⁶⁵

Periode 1903–1930 menjadi saksi dokumentasi historis tentang bagaimana sebuah komunitas Jawa ditransfer, diimplantasikan, dan dikonsolidasikan ke dalam lanskap Gedong Tataan. Data arsip menunjukkan bahwa sejak kedatangan gelombang pertama 155-200 kepala keluarga dari Keresidenan Kedu pada November 1905, pemerintah kolonial telah mengalokasikan dana sebesar 300 gulden per kepala keluarga untuk pembukaan lahan, pembangunan rumah, dan jaminan hidup selama dua tahun pertama.¹ Pada tahun 1916, luas sawah basah yang berhasil dikembangkan di wilayah kolonisasi Gedong Tataan telah mencapai 700 bau (sekitar 490 hektar), dengan sistem irigasi teknis yang terhubung ke Way Sekampung.⁶⁶

Transfer ekosistem sosial-budaya Jawa juga terekam dalam pembentukan struktur pemerintahan desa ala Jawa dengan perangkat Lurah, Carik, dan Kamitua di desa-desa koloni seperti Bagelen (1905), Karanganyar (1907), dan Kutoarjo (1910).³ Penamaan desa sesuai daerah asal di Jawa Bagelen dari

⁶⁵ "Hilman Hadikusuma, Masyarakat Dan Adat Budaya Lampung (Bandung: Alumni, 1985/1989),"

⁶⁶ "Wikipedia, 'Bagelen, Gedong Tataan, Pesawaran,' Diakses 15 Februari 2026, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bagelen,_Gedong_Tataan,_Pesawaran; Lihat Juga 'Early Colonization Policy in Colonial Lampung and Javanese Settlers: From 1905 to the 1920s,' Japan So,"

Purworejo, Karanganyar dari Solo, Kutoarjo dari Kedu menunjukkan upaya sadar menciptakan "segumpal tanah Jawa" (*een stukje Java*) di tengah wilayah adat Lampung. Laporan *Memorie van Overgave Asisten Residen Lampung* tahun 1918 mencatat bahwa desa-desa koloni ini sengaja dibangun sebagai unit administratif terpisah dari struktur marga Lampung untuk memudahkan pengawasan dan mencegah konflik adat. Proses konsolidasi politik dan agraria berlangsung di bawah pengawasan ketat birokrasi kolonial. Berdasarkan *Gouvernementsbesluit* tanggal 21 Mei 1905 No. 28, Lampung ditetapkan sebagai daerah tujuan kolonisasi dengan instruksi teknis untuk mengembangkan sistem persawahan irigasi ala Jawa. Hingga tahun 1930, ketika Depresi Ekonomi Besar menghentikan arus emigrasi, telah terbentuk *enklave-enklave* Jawa yang permanen di Gedong Tataan dengan sistem sosial, budaya, politik, dan agraria yang berbeda dari masyarakat adat Lampung di sekitarnya.⁶⁷

Dengan demikian, periode 1903–1930 telah meletakkan fondasi dan cetak biru transformasi struktur sosial masyarakat Gedong Tataan secara permanen. Dampak mendalam dari proses inilah yang terekam dalam arsip kolonial, laporan administratif, dan jejak permukiman yang masih dapat dilacak hingga kini yang akan menjadi fokus analisis dalam bab-bab selanjutnya.⁶⁸

⁶⁷ “Udo Z Karzi, ‘Menjadi Lampung Dengan Pluralitas: Refleksi Atas Aksi Kekerasan Dan Kerusuhan Di Lampung,’ Kompasiana.Com, 23 November 2012, <https://www.kompasiana.com/udozkarzi/5519d764a33311cd1bb65992/Menjadi-Lampung-Dengan-Pluralitas-Refleksi-Atas-Aksi-K>,”

⁶⁸ “Koesoemawati, ‘Adaptasi Ekologis Dan Sosial Emigran Jawa Di Lahan Basah Sumatera (1905-1930),’ Jurnal Sejarah Dan Budaya 14, No. 2 (2020): 201-218,”

DAFTAR PUSTAKA

- (ANRI), Arsip Nasional Republik Indonesia. "Kartografi Indonesia 1437, Dalam Majalah ARSIP, Edisi 75." Jakarta, 2018.
- "Aan Budianto, 'Kecanga Sosial Di Lampung Akibat Program Transmigrasi Di Era 1950an,' Jurnal Candi 20, No. 1 (2020): 18-31,"
- "Adat-Instellingen, Op.Cit., Hlm. 22-23,"
- Adat-Instellingen Der Lampongsche Districten, Diterbitkan Oleh Het Kantoor Voor Inlandsche Zaken (1910), Hlm. 15-18.,*
- "Adat-Instellingen Der Lampongsche Districten (Batavia: Kantoor Voor Inlandsche Zaken, 1910), Hlm. 16-18.,"
- "Adat-Instellingen Der Lampongsche Districten (Batavia: Kantoor Voor Inlandsche Zaken, 1910), Hlm. 16.,"
- "Agus Riyanto, 'Dinamika Konflik Dan Kolaborasi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Lahan Pertanian Gedong Tataan, 1915-1930,' Jurnal Agraria Dan Pertahanan 8, No. 2 (2023): 156-174.,"
- "Agus Riyanto, 'Dinamika Konflik Dan Kolaborasi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Lahan Pertanian Gedong Tataan, 1915-1930,' Jurnal Agraria Dan Pertahanan 8, No. 2 (2023): Hlm. 156-174.,"
- "Ahmad Fauzi, 'Islam Di Kalangan Kolonis Jawa: Kontinuitas Dan Perubahan Praktik Keagamaan Di Daerah Rantau (Lampung), 1905-1930,' Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat 18, No. 2 (2022): 167-185.,"
- "Ahmad Norma Permata, 'Segmentasi Etnis Dan Interaksi Sosial Dalam Masyarakat Majemuk Kolonial: Studi Interaksi Terbatas Di Kota-Kota Hindia Belanda,' Jurnal Antropologi Indonesia 40, No. 2 (2019): 178-195.,"
- "ANRI, Algemene Secretarie, Grote Bundel Besluit No. 1677, Hlm. 18-21,"
- "ANRI, Algemene Secretarie, Grote Bundel Besluit No. 1677: 'Advies En Overwegingen Betreffende Het Emigratieplan van Java Naar de Lampongsche Districten,' 29 Januari 1904, Hlm. 3.,"
- "ANRI, Algemene Secretarie, Grote Bundel Besluit No. 1677: 'Advies En Overwegingen Betreffende Het Emigratieplan van Java Naar de Lampongsche Districten,' 29 Januari 1904, Hlm. 8-10.,"
- "ANRI, Memorie van Overgave van Den Assistent-Resident Der Lampongsche Districten, 1915, Inventaris 2.10.39, No. 102, Hlm. 23-25.,"

- “ANRI, Memorie van Overgave van Den Assistent-Resident Der Lampongsche Districten, 1915, Inventaris 2.10.39, No. 102, Hlm. 24-25.,”
- “ANRI, Memorie van Overgave van Den Assistent-Resident Der Lampongsche Districten, 1915, Inventaris 2.10.39, No. 102, Hlm. 24.,”
- “ANRI, Memorie van Overgave van Den Assistent-Resident Der Lampongsche Districten, 1915, Inventaris 2.10.39, No. 102, Hlm. 24.,”
- ANRI. *Algemene Secretarie, Grote Bundel Besluit No. 1677, Serta Laporan Kolonisasi Lampung Awal Abad 20, Sebagaimana Dimuat Dalam Majalah ARSIP Edisi 75, Hlm. 18–21., 2018.*
- “Arief Budiman, ‘Struktur Sosial Masyarakat Majemuk Dalam Perspektif Kolonial: Studi Tentang Masyarakat Hindia Belanda,’ Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 24, No. 1 (2020): 45-62.,”
- “Aris Munandar, ‘Kebijakan Kolonial Belanda Dalam Pengaturan Permukiman Dan Dampaknya Terhadap Relasi Etnis Di Lampung (1905-1930),’ Jurnal Sejarah Citra Lekha 6, No. 2 (2021): 145-162,”
- “Arsip Nasional Republik Indonesia, Memorie van Overgave van Den Assistent-Resident Der Lampongsche Districten, 1915, Inventaris 2.10.39, No. 102, Hlm. 23-25,”
- Arsip Nasional Republik Indonesia, koleksi Arsip Kolonial. *Memorie van Overgave van de Residentie Lampongsche Districten*, 1915.
- “Bartoven Vivit Nurdin Dan Damayanti, ‘Land of Hope and Land of the Lost: Study of Power Relations and Local Wisdom Ethnic Lampung, Sumatra, Indonesia,’ International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 5, No. 1 (2018): Hlm. 30-32,”
- Brennan, Jan. “Keuntungan Kolonial Dari Kerja Paksa: Sistem Priangan Dari Tanam Paksa Kopi Di Jawa, 1720-1870. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), Hlm. 89-92.,”
- D.H. Burger, *Sociologisch-Economische Geschiedenis van Indonesië (Wageningen: Landbouwhogeschool, 1975), Jilid 2, Hlm. 45-50.,*
- “Dea Anastasya Simarmata, ‘Kebijakan Agraria 1870 Dan Dampaknya Terhadap Mobilitas Sosial Masyarakat Jawa,’ Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary 3, No. 2 (2025): 353–358,”
- Dewi, Sari Mustika. “Struktur Sosial Masyarakat Lampung Pepadun Dan Pergesarannya Pada Masa Kolonialitle.” *Jurnal Sositologi 2*

- (2019): 238.
- “Early Colonization Policy in Colonial Lampung and Javanese Settlers: From 1905 to the 1920s,” Japan Society for Southeast Asian Studies, 2009, Hlm. 4-5; ANRI, *Memorie van Overgave*, 1915, Hlm. 26.,”
- “Eva Nurhayati, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Penyimbang Dalam Sengketa Waris (Studi Kasus Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Kecamatan Blambangan Pagar)’ (Skripsi, IAIN Raden Intan Lampung, 2017), Hlm. 56-58,”
- “Faisal Madani, ‘Kebijakan Segregasi Pemukiman Kolonial Dan Dampaknya Terhadap Relasi Etnis Jawa-Lampung Di Gedong Tataan,’ *Jurnal Sejarah Dan Budaya* 17, No. 2 (2023): 189-207.,”
- “Farida Ariyani, Ronaldo Fisda Costa, Dan Mohammad Ridwan, ‘Ngejuk - Ngakuk Dalam Bingkai Adat Perkawinan (Lampung – Jawa),’ *Kejawen* 5, No. 2 (2025): Hlm. 118-120, [https://journal.uny.ac.id/kejawen/article/view/46281.](https://journal.uny.ac.id/kejawen/article/view/46281),”
- “Fatimah Husein, ‘Lembaga Keagamaan Dan Otoritas Keislaman Di Lampung Masa Kolonial: Antara Pesantren Kolonis Dan Meunasah Adat,’ *Jurnal Pendidikan Islam* 11, No. 2 (2022): 201-219.,”
- “Geertz, Clifford. 1960. *The Religion of Java*. Chicago: University of Chicago Press,”
- Gusti Anshari Syah, “*Kebijakan Agraria Kolonial Belanda Dan Dampaknya Terhadap Struktur Kepemilikan Tanah Di Jawa (1870-1942)*,” *Jurnal Sejarah Citra Lekha* 5, No. 1 (2020): 45-60.,
- “H. Wahyu Iryana, ‘Lampung: Dari Lada Kolonial Hingga Kopi Robusta Mendunia,’ MUI Lampung Digital, 20 November 2025, <https://lampung.mui.or.id/?P=19356>,”
- Hadikusuma, Hilman. *Hilman Hadikusuma, Masyarakat Dan Adat Budaya Lampung*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- . *Masyarakat Dan Adat Budaya Lampung*. Bandung: Alumni, 1989.
- “Hamid, ‘Emigrasi Pertanian Jawa Di Lampung,’ 2025,”
- Hamid, Abd Rahman, and Muhammad Saleh Madjid. “Pengantar Ilmu Sejarah.” *Yogyakarta: Ombak* 12, no. 2 (2011).
- “Heru Prasetya, ‘Akulturasi Terbatas: Sintesis Budaya Jawa Dan Lampung Dalam Bingkai Masyarakat Majemuk Kolonial,’ *Jurnal Kajian Budaya* 14, No. 2 (2024): 145-163.,”
- “Hilman Hadikusuma, *Masyarakat Dan Adat Budaya Lampung* (Bandung: Alumni, 1985/1989),”

- “Hilman Hadikusuma, Masyarakat Dan Adat Budaya Lampung (Bandung: Alumnus, 1989), Hlm. 89-92,”
- “Hilman Hadikusuma, Masyarakat Dan Adat Budaya Lampung (Bandung: Mandar Maju, 1989), 45-60.”
- I. J. Brugmans, *Geschiedenis van Het Onderwijs in Nederlandsch-Indië* (Groningen: J.B. Wolters, 1938), Hlm. 156-160.,
- Indonesia, Arsip Nasional Republik (ANRI). *Algemene Secretarie, Laporan Kolonisasi Lampongsche Districten*, Awal Abad Ke-20., 1905.
- J. M. van Der Kroef, “*The Indonesian City: Its Culture and Evolution*,” *Asian Survey* 1, No. 10 (1961): 23-31.,
- J. van Den Berg, *De Kolonisatie Der Javanen in de Buitengewesten* (Wageningen: H. Veenman & Zonen, 1939), Hlm. 112-115.,
- “John S. Furnivall, *Netherlands India: A Study of Plural Economy* (Cambridge: Cambridge University Press, 1944), Hlm. 8-12.”
- Kano, Hiroyoshi. *Land Tenure System and the Desa Community in Nineteenth-Century Java* (Tokyo: Institute of Developing Economies, 1977), Hlm. 45-50.,
- “Kartodirdjo, Sartono. 1991. *Modern Indonesia: Tradition and Transformation*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.”
- Khoiriyah, Febriana, Ardian Fahri, and Bimo Bramantio. “Sejarah Toponimi Daerah Transmigrasi Provinsi Lampung Melalui Tuturan Tradisi Lisan Pendahuluan,” 1903, 221–40.
- “Koesoemawati, ‘Adaptasi Ekologis Dan Sosial Emigran Jawa Di Lahan Basah Sumatera (1905-1930),’ *Jurnal Sejarah Dan Budaya* 14, No. 2 (2020): 201-218,”
- “Koloniale Verslagen 1905-1906* (Batavia: Landsdrukkerij, 1907), Hlm. 234-236; Lihat Juga J. van Den Berg, *De Kolonisatie Der Javanen in de Buitengewesten* (Wageningen: H. Veenman & Zonen, 1939), Hlm. 112-115,”
- “Koloniale Verslagen 1905 (Batavia: Landsdrukkerij, 1906), Hlm. 234-235,”
- “Koloniale Verslagen 1918 (Batavia: Landsdrukkerij, 1919), Hlm. 278-280.”
- “Kolonisatie-Plan Voor de Lampongsche Districten 1905*, Arsip Nasional Republik Indonesia, Inventaris 2.10.50, No. 12,”
- Kolonisatieverslag van Nederlandsch-Indië 1905-1930* (Wetevreden: Landsdrukkerij, 1931), Hlm. 23-30.,
- “Lestari Wijayanti, ‘Perkawinan Lintas Etnis Jawa-Lampung Sebagai

- Media Akulturasi Budaya Pada Masa Kolonial,' Jurnal Kajian Budaya Nusantara 9, No. 1 (2024): 78-95.,”
- “Lgemeen Handelsblad, 8 Desember 1906, Hlm. 2; Museum Nasional Ketransmigrasian, ‘Sejarah Transmigrasi,’ Hlm. 12; Petrik Matanasi, ‘Gedong Tataan Lokasi Transmigrasi Pertama,’ Historia.Id, 13 Mei 2025,”
- Lly Touwen-Bouwsma, “*Fotografie Als Historische Bron: De Beeldvorming van Kolonisatie in Nederlands-Indië*,” *Tijdschrift Voor Geschiedenis* 112, No. 3 (1999): 365-381.,
- “Memorie van Overgave van de Resident Der Lampongse Districten (Laporan Serah Jabatan Residen Lampung), 1915, Arsip Nasional Republik Indonesia, Koleksi Arsip Hindia Belanda, Toegang 2.10.39, Inventaris 209,”
- “Memorie van Overgave van Den Assistent-Resident Der Lampongsche Districten, 1918, Arsip Nasional Republik Indonesia, Inventaris 2.10.39, No. 102, Hlm. 23-27.,”
- Migrasi, Pola, Intergenerasi Transmigran, and Analisis Karakteristik. “Pola Migrasi Intergenerasi Transmigran Jawa Di Lampung: Analisis Karakteristik Dan Perkembangan Kehidupan Dzaki.” *Journal of Indonesian Rural and Regional Government* 8, no. 2 (2024): 236–50.
- “Mohammad Medani Bahagianda, ‘Buku Seri Lampung Pubian Dalam Komunitas Pepadun Seri 2: Struktur Adat Dan Kelembagaan Dalam Pubian,’ Portal Berita Natar Agung, 25 Juli 2025,”
- “Mohammad Medani Bahagianda, ‘Sejarah Penyimbang Dalam Tradisi Sai Batin Dan Pepadun: Seri 1 - Asal Usul Dan Filosofi Gelar Penyimbang,’ Portal Berita Natar Agung, 28 Juni 2025,”
- “Mohammad Medani Bahagianda, ‘Sejarah Penyimbang Dalam Tradisi Sai Batin Dan Pepadun (Seri 5),’ Nataragung.Id, 2 Juli 2025,”
- “Museum Nasional Ketransmigrasian, ‘Sejarah Transmigrasi,’ Dalam *Naskah Sumber Arsip: Penelusuran Sejarah Kolonisasi Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Afdeeling Telok Betong (1905-1930)* (Bandarlampung: Museum Nasional Ketransmigrasian, 2023), Hlm. 12;,”
- “Museum Nasional Ketransmigrasian, ‘Sejarah Transmigrasi,’ Dalam *Naskah Sumber Arsip: Penelusuran Sejarah Kolonisasi Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Afdeeling Telok Betong (1905-1930)* (Bandarlampung: Museum Nasional Ketransmigrasian, 2023), Hlm. 12,”
- “Nota van Toelichting Betreffende de Lampongsche Districten (Batavia:

- Landsdrukkerij, 1898), Hlm. 42,”
- “Oyos Saroso H.N., ‘Sejarah Transmigrasi Di Lampung: Mereka Datang Dari Bagelen,’ Teraslampung.Com, 6 Februari 2014.,”
- “Peta Distrik Lampung Tahun 1927 Yang Tersimpan Di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Jakarta, Koleksi Kartografi.,”
- “Petrik Matanasi, ‘Gedong Tataan Lokasi Transmigrasi Pertama,’ Historia.Id, 13 Mei 2025, <https://historia.id/politik/articles/gedong-tataan-lokasi-transmigrasi-pertama-pob2a>; Museum Nasional Ketransmigrasian, ‘Sejarah Transmigrasi,’ Dalam *Naskah Sumber Ar,”
- “Petrik Matanasi, ‘Gedong Tataan Lokasi Transmigrasi Pertama,’ Historia.Id, 13 Mei 2025; Kompas.Com, ‘Program Transmigrasi Pada Masa Penjajahan Belanda,’ 17 Mei 2022.,”
- “Petrik Matanasi, ‘Gedong Tataan Lokasi Transmigrasi Pertama,’ Historia.Id, 13 Mei 2025,”
- Pramono, Agus. “Kebijakan Emigrasi Kolonial Belanda Ke Lampung: Studi Tentang Directie Der Kolonisatie 1905-1920.” Disertasi, Universitas Gadjah Mada, 2020.
- “R. Ginting, Hukum Tanah Adat Lampung: Dinamika Dan Perkembangannya (Bandarlampung: Aura Publishing, 2015), Hlm. 75-77,”
- “R.Z. Leirissa, Gedong Tataan: Enclave Jawa Dalam Masyarakat Lampung (Disertasi, Universitas Indonesia, 1981), Hlm. 87-112.,”
- “Rapport over de Handel En Nijverheid in de Lampongsche Districten, 1925, Arsip Nasional Republik Indonesia, Inventaris 2.10.01, No. 2456, Hlm. 12-15.,”
- “Ronaldo Fisda Costa, Farida Ariyani, Dan Mohammad Ridwan, ‘Ngejuk - Ngakuk Dalam Bingkai Adat Perkawinan (Lampung – Jawa),’ Kejawen 1, No. 2 (2021): Hlm. 1-2,”
- S. K. Hetami, “*Emigrasi Ke Lampung: Kebijakan Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Lokal 1905-1942*,” *Jurnal Sejarah Dan Budaya* 10, No. 2 (2016): 145-162.No Title,
- “S. K. Hetami, ‘Emigrasi Ke Lampung: Kebijakan Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Lokal 1905–1942,’ *Jurnal Sejarah Dan Budaya* 10, No. 2 (2016): 145–162,”
- “Saroso, ‘Mereka Datang Dari Bagelen,’ 2014; ‘Sejarah Transmigrasi Orang-Orang Jawa Ke Lampung,’ 2022,”
- “Sartono Kartodirdjo, *Modern Indonesia: Tradition and Transformation*

- (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991), 112.,”
- “‘Sejarah Transmigrasi Orang-Orang Jawa Ke Lampung,’ Merdeka.Com, 27 Juli 2022,”
- Simarmata, Dea Anastasya. “Kebijakan Agraria 1870 Dan Dampaknya Terhadap Mobilitas Sosial Masyarakat Jawa.” *Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary* 3, no. 2 (2025): 353–58.
- Sjafnir, N.A. *Kolonisasi Tani Jawa Di Lampung 1905-1942*. Bandung: Mimbar Press, 2003.
- “Soerabajasch Handelsblad, 14 Mei 1907, Hlm. 3; Bandingkan Dengan Pola Pemerintahan Desa Di Jawa Dalam Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah (Jakarta: Gramedia, 1992), Hlm. 78-80,”
- “Sri Wahyuni, ‘Hierarki Baru Dalam Komunitas Kolonis: Pembentukan Elit Lokal Di Permukiman Jawa Gedong Tataan, 1910-1930,’ Jurnal Sejarah Dan Budaya 15, No. 2 (2021): 178-195.,”
- “Sri Wahyuni, ‘Hierarki Baru Dalam Komunitas Kolonis: Pembentukan Elit Lokal Di Permukiman Jawa Gedong Tataan, 1910-1930,’ Jurnal Sejarah Dan Budaya 15, No. 2 (2021): Hlm. 178-195,”
- “Staatsblad van Nederlandsch-Indië No. 123 (1911): ‘Regeling Der Emigratie van Java Naar de Buitengewesten,’* Hlm. 1-15,”
- Staatsblad van Nederlandsch-Indië No. 123 (1911): “Regeling Der Emigratie van Java Naar de Buitengewesten,” Hlm. 1-15.,*
- “Staatsblad van Nederlandsch-Indië No. 28 (1905): ‘Besluit van Den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië van 21 Mei 1905, Betreffende de Kolonisatie van Javaansche Landbouwers in de Buitengewesten’*; Lihat Juga ANRI, Algemene Secretarie, Grote Bundel ,”
- “Suryadi, ‘Corak Keislaman Masyarakat Lampung Pepadun: Peran Penyimbang Dan Adat Dalam Praktik Agama,’ Jurnal Al-Qalam 27, No. 1 (2021): 89-110.,”
- “Suryadi, ‘Corak Keislaman Masyarakat Lampung Pepadun: Peran Penyimbang Dan Adat Dalam Praktik Agama,’ Jurnal Al-Qalam 27, No. 1 (2021): 95-97,”
- “Syafuruddin Yusuf, ‘Pola Permukiman Tersebar Masyarakat Adat Lampung: Kajian Tentang Tiuh Dalam Sistem Marga,’ Jurnal Arsitektur Nusantara 5, No. 2 (2021): 89-104.,”
- “Syamsul Hadi, ‘Dari Plural Society Ke Masyarakat Multikultural: Transformasi Dan Kontinuitas Hubungan Etnis Di Lampung Pasca-Kolonial,’ Jurnal Studi Kepemerintahan 11, No. 1 (2023): 56-78.,”

- Taufik, Ahmad. "No Ampak Sosial Kolonisasi Jawa Terhadap Masyarakat Lokal Di Lampung Awal Abad Ke-20." *Jurnal Humaniora* 12 1 (2020): 48.
- "Udo Z Karzi, 'Menjadi Lampung Dengan Pluralitas: Refleksi Atas Aksi Kekerasan Dan Kerusakan Di Lampung,' Kompasiana.Com, 23 November 2012, <https://www.kompasiana.com/udozkarzi/5519d764a33311cd1bb65992/menjadi-lampung-dengan-pluralitas-refleksi-atas-aksi-k>,"
- "Verslag over de Gezamenlijke Islamitische Feestvieringen in de Lampongsche Districten, 1910, ANRI Inventaris 2.10.36, No. 365, Hlm. 5,"
- "Verslag over de Gezamenlijke Islamitische Feestvieringen in de Lampongsche Districten, 1922, Arsip Nasional Republik Indonesia, Inventaris 2.10.36, No. 365.,"
- Verslag over de Kolonisatie van Javaansche Emigranten in de Lampongsche Districten over Het Jaar 1909 (Batavia: Landsdrukkerij, 1910), Hlm. 15-18,*
- "Verslag over de Kolonisatie van Javaansche Emigranten in de Lampongsche Districten over Het Jaar 1909 (Batavia: Landsdrukkerij, 1910), Hlm. 8,"
- "Vivit Nurdin Dan Bartoven, 'Land of Hope and Land of the Lost: Study of Power Relations and Local Wisdom Ethnic Lampung,' International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 2018, Hlm. 30-32,"
- "Wagiso (Kepala Desa Bagelen 1980-2007), Wawancara Dalam Kompas.Id, 'Harmoni Dalam Kemajemukan,' 20 April 2018,"
- "Wikipedia, 'Bagelen, Gedong Tataan, Pesawaran,' Diakses 15 Februari 2026, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bagelen,_Gedong_Tataan,_Pesawaran; Lihat Juga 'Early Colonization Policy in Colonial Lampung and Javanese Settlers: From 1905 to the 1920s,' Japan So,"
- "Wikipedia, 'Bagelen, Gedong Tataan, Pesawaran,' Diakses 15 Februari 2026, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bagelen,_Gedong_Tataan,_Pesawaran; Verslag over de Kolonisatie van Javaansche Emigranten in de Lampongsche Districten over Het Jaar 1909 (Batavia: La,"
- "Zainal Abidin, Struktur Masyarakat Marga Di Lampung (Bandarlampung: Penerbit Universitas Lampung, 2010), Hlm. 98,"

perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

SKRIPSI MEZA Ismiani 1-4

 ADAB APRIL

Document Details

Submission ID

trn:oid::3618:134633983

Submission Date

9 Apr 2026, 10:43 GMT+7

Download Date

9 Apr 2026, 10:55 GMT+7

File Name

SKRIPSI MEZA Ismiani 1-4.docx

File Size

1.5 MB

103 Pages

23,576 Words

158,427 Characters

12% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Top Sources

- 11%  Internet sources
- 5%  Publications
- 7%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

11%  Internet sources
5%  Publications
7%  Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.radenintan.ac.id	1%
2	Internet	anri.go.id	1%
3	Internet	jdi.h.lampungprov.go.id	<1%
4	Internet	digilib.uin-suka.ac.id	<1%
5	Internet	hdl.handle.net	<1%
6	Internet	text-id.123dok.com	<1%
7	Internet	www.ejournal.radenintan.ac.id	<1%
8	Internet	ejournal.radenintan.ac.id	<1%
9	Internet	etheses.uin-malang.ac.id	<1%
10	Internet	www.grafiati.com	<1%
11	Internet	id.wikipedia.org	<1%

12	Student papers	Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta on 2026-03-13	<1%
13	Publication	Luthfi Salim, Ikhwan Galih Ilman. "Muakhi Culture Strategy in Resolving Multicult...	<1%
14	Internet	urj.uin-malang.ac.id	<1%
15	Student papers	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2025-05-19	<1%
16	Internet	basque.unr.edu	<1%
17	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2024-09-24	<1%
18	Internet	www.goodreads.com	<1%
19	Internet	ojs.stmikpringsewu.ac.id	<1%
20	Internet	repositori.kemdikbud.go.id	<1%
21	Internet	repository.uinjkt.ac.id	<1%
22	Internet	jurnal.ucy.ac.id	<1%
23	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2024-05-08	<1%
24	Internet	www.scribd.com	<1%
25	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2024-12-27	<1%